



**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
EKONOMI MASYARAKAT MELALUI USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI
DESA BOJONG GEDE KECAMATAN BOJONG
GEDE KABUPATEN BOGOR PROVINSI
JAWA BARAT**

Disusun Oleh :

Rikardus Monaweyauw

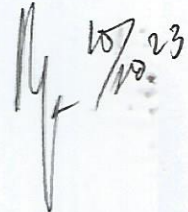
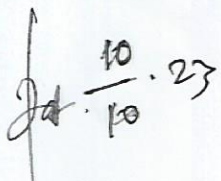
172041832

PROGRAM STUDI : ILMU PEMERINTAHAN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.IP)
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

**SEKOLAH TINGGI ILMU PEMERINTAHAN
ABDI NEGARA
TAHUN 2023**

	KOREKSI PENGUJI	No. Dokumen Tanggal Terbit No. Revisi	: : 8 Januari 2023 : 10
Nama : Rikardus Monaweyauw NPM : 172041832 Angkatan/Kelsa : XXVII/ A2 Program Studi : Ilma Pemerintahan Judul : Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui usaha mikro kecil dan menengah UMKM di desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat			
NO	PEMBIMBING/PENGUJI	SARAN PEMBIMBING/PENGUJI	PARAF
1	Jovan Prima Firmansyah, S.Sos, M.Hum	a. Abstrak sudah diperbaiki b. Kesalahan huruf titik koma sudah diperbaiki. c. Kerangka Pemikiran sudah di perbaiki. d. Rumusan masalah & tujuan penelitian dengan hipotesis serta kesimpulan dan saran sdh di sinkronkan/diperjelas semua. e. Daftar pustaka sudah diperjelas.	9/10/23 
2	Dr.Rajaner P. Simarmata, M,Si	a. Pengetikan sudah diperbaharui 2 spasi. b. Kerangka Pemikiran sudah diperjelas. c. Hipotesis sudah di perjelas. d. Kesimpulan dan saran sudah di perjelas. e. Daftar pustaka sudah diperjelas.	
3	Ratna Indriasari, SE, M.Pd	a. Abstrak sudah diperjelas b. Kata pengantar sudah direvisi c. Kegunaan Penelitian sudah ditambahkan	

Mengetahui



(Catur Widiatmoko, SS. M.IP)
 Ketua Program Studi



(Jovan Prima Firmansyah, S.Sos, M.Hum)
 Pembimbing

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI
MASYARAKAT MELALUI USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH (UMKM) DI DESA BOJONG GEDE
KECAMATAN BOJONG GEDE KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**

Rikardus Monaweyauw

172041832

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.IP)
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Diperiksa dan Disetujui Oleh :



(Jovan Prima Firmansyah, S.Sos, M.Hum)

Pembimbing I

Tanggal : 31/10/23



(Catur Widiatmoko, S.S., M.IP)

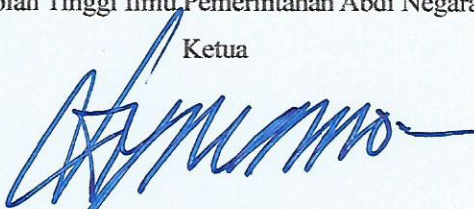
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Tanggal :

Mengetahui

Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara

Ketua



(Dr. Sumarsono, MDM)

Tanggal : 12-11-2023

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rikardus Monaweyauw
NPM : 172041832
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa Skripsi ini adalah murni dari hasil karya sendiri, apa bila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumber sesuai ketentuan yang berlaku.

Saya bersedia dikenakan sanksi pembatalan skripsi ini sesuai dengan ketentuan di STIP-AN apabila melakukan tindakan plagiat (Penjiplakan).

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 11. OKTOBER 2023



Rikardus
Rikardus Monaweyauw
NPM : 172041832

ABSTRAK

**Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
(Studi Kasus : di Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat)**

**Oleh
Rikardus Monaweyauw
172041832**

**Pembimbing :
Jovan Prima Firmansyah, S.Sos, M.Hum**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui UMKM di Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 78 Ayat 1-2 dan 3 Tentang Pembangunan Desa, bertujuan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

UMKM memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian lokal dan memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat ditingkat desa. Namun, untuk mencapai potensi sepenuhnya, maka diperlukan adanya dukungan dan peran yang efektif dari pemerintah desa agar bisa mendorong ekonomi masyarakat melalui UMKM di desa supaya bisa berkembang.

Penelitian ini menggunakan (Metode Kualitatif) dengan metode deskripsi. Instrumen penelitian menggunakan metode wawancara, menggunakan teori Sugiyono (2012 : 224), data yang telah diperoleh peneliti akan diolah dalam analisis data penelitian dengan berangkat dari pengumpulan data, transkrip data, kategorisasi data dan penyimpulan, Menurut Miles dan Huberman dalam sutopo (2006:16).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran pemerintah desa dalam mendukung dan meningkatkan UMKM serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.

kata kunci : peran pemerintah desa, ekonomi, umkm, partisipasi masyarakat.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih/rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Didesa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat”, skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk dapat dinyatakan lulus program studi Ilmu Pemerintahan (S1) pada Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN) Jakarta.

Dalam hal ini juga penulis menyampaikan ucapan Terima Kasih yang sebesar-besarnya, Kepada Bapak Jovan Prima Firmansyah, S.Sos.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing, mengarahkan dan mendorong dalam menyusun skripsi ini.

Tak lupa juga, penulis menyampaikan ucapan Terima Kasih Kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan kepada penulis dari segala aspek, hingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada.

1. Bapak Prof.Dr.Ermaya Suradinata, SH,MH,MS selaku Pembina STIP-AN.
2. Bapak Dr.Sumarsono, MDM. selaku Ketua STIP-AN.
3. Bapak Dr.Sofyan Safari Hamim, M.SI selaku Wakil Ketua STIP-AN.
4. Bapak Catur Widiatmoko, SS,M.IP selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Pemerintahan STIP-AN.
5. Bapak Dr.Rajanner P.Simarmata, M.Si Selaku Direktur Akademik STIP-AN.
6. Seluruh Civitas Akademik STIP-AN yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di kampus STIP-AN.
7. Seluruh Dosen Penguji Sidang Usulan Penelitian hingga Sidang Komprehensif, Pengasuh, Pelatih, maupun Pengawas yang tak lelah untuk

selalu memberikan pengetahuan kepada penulis dengan ikhlas dan sabar serta yang telah memberikan banyak ilmu dan membuka wawasan berfikir.

8. Bapak Dede Malvina selaku Kepala Desa dan Sekretaris Desa Bapak H, Caal Beserta Jajaran Birokrat Pemerintah desa serta Warga/Masyarakat Desa Bojong Gede yang telah meluangkan waktunya untuk penulis.
9. Kepada Pemerintah Kabupaten Mimika yang telah memberikan peluang bagi kami Anak-anak Amungme dan Kamoro untuk mengikuti pendidikan di Kampus STIP-AN Jakarta.
10. Kepada Keluargaku, Ayah Philipus Monaweyauw, SE, MM. Ibu Sinta Fatubun selaku orang tua penulis yang saya cintai dan yang telah dengan setia selalu Mendo'akan, mendorong, memberikan arahan dan nasehat, yang telah membesarkan dan menjaga serta yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, baik moral maupun materil untuk keberhasilan anaknya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Dafit Kameyau dan Ibu Teresia Matamoa serta semua keluarga besar Matamoa, yang selalu supot memberikan dukungan sepenuhnya untuk keberhasilan saya.
12. Saudara-saudariku Kakak Yulianti Monaweyauw, Selviana Monaweyauw, Mikice Monaweyauw dan Kristian Yawan, Levina Yawan dan semua saudara-saudariku, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang senantiasa mendorong, membantu baik dalam sisi motivasi maupun arahan/nasehat dan selalu mendo'akan untuk keberhasilan saya.
13. Istriku Falentina Telly Matamoa dan Anak-anakku yang tercinta.
14. Teman-Teman Praja STIPAN Angkatan XXVII khususnya kelas A.2.
15. Seluruh Mahasiswa/Mahasiswi Pamong Pemerintahan, Muda Praja, Madya Praja, Nindya Praja, dan Utama/Wasana Bina Praja, yang pantas dibanggakan yang penuh dengan rasa jiwa korsa, solidaritas yang tinggi, rasa persaudaraan yang hangat, yang terjalin erat selama ini menjadi kenangan yang mengesankan dan tak bisa terlupakan.

16. Seluruh pihak yang membantu hingga skripsi ini selesai.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga mengharapkan dukungan berupa saran/masukan dan kritik dari berbagai pihak guna perbaikan pada penyusunan selanjutnya, semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait.

Jakarta,

Rikardus Monaweyauw

NPM :172041832

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI	iii
Abstrak	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Pembatasan Masalah.....	11
1.4 Perumusan Masalah	12
1.5 Tujuan Penelitian	12
1.6 Kegunaan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Kerangka Teoritis.....	15
2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan.....	24
2.3 Kerangka Pemikiran dan Operasional Konsep	27
2.4 Kerangka Pemikiran.....	27
2.5 Operasional Konsep	30
2.6 Hipotesis	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	33
3.1 Pendekatan Penelitian	33
3.2 Lokasi Dan Jadwal Penelitian.....	34
3.1.1 Lokasi Penelitian.....	34
3.1.2 Jadwal Penelitian	35
3.3 Latar/Setting Penelitian.....	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data	36
3.1.3 Teknik Observasi	36

3.1.4	Teknik Wawancara	37
3.1.5	Teknik Studi Dokumentasi.....	39
3.5	Teknik Analisis Data.....	40
3.6	Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	41
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1	Gambaran Umum Lokasi/Lokus.....	44
4.2	Profil Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede.....	44
4.2.1	Kondisi Pemerintahan Desa Bojong Gede.....	44
4.2.2	Sejarah Desa Bojong Gede	45
4.2.3	Legenda Desa (Sasakala).....	45
4.2.4	Terbentuknya Desa Bojong Gede	46
4.2.5	Aspek Pertanahan	48
4.2.6	Aspek Pendidikan	51
4.2.7	Kondisi Ekonomi Desa Bojong Gede.....	53
4.2.8	Kondisi Pertumbuhan Perekonomian	54
4.2.9	Kondisi Infrastruktur Desa.....	57
4.3	Hasil Penelitian.....	62
4.4	Pembahasan Temuan Penelitian	66
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
5.1	Kesimpulan	70
5.2	Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....		74
LAMPIRAN		78
RIWAYAT HIDUP		104

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Dengan Batas Wilayah Kerja Sebagai Berikut ;	45
Tabel 4.2	Sumber : Pemerintahan Desa Bojong Gede Tahun 2022.....	45
Tabel 4.3	Peta Tapal Batas Desa Bojong Gede.....	46
Tabel 4.4	Luas Wilayah Menurut Penggunaannya Sumber Pemerintah Desa....	46
Tabel 4.5	Pengunaan Tanah Kering Sumber Pemerintah Desa	47
Tabel 4.6	Pengunaan Tanah Basah	47
Tabel 4.7	Tanah Perkebunan.....	47
Tabel 4.8	Pengunaan Tanah Fasilitas Umum Sumber Pemerintah Desa	47
Tabel 4.9	Status Kepemilikan Tanah Sumber Pemerintah Desa.....	48
Tabel 4.10	Kondisi Luas Tanah	48
Tabel 4.11	Jumlah Wajib Pajak	49
Tabel 4.12	Aspek Demografi	50
Tabel 4.14	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Sumber Pemerintah Desa	50
Tabel 4.13	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Bojong Gede Tahun 2021, Sumber Pemerintah Desa.....	50
Tabel 4.15	Jumlah Penduduk Berdasarkan Wilayah (RW) di Desa Bojong Gede, Sumber Pemerintah Desa.....	51
Tabel 4.16	Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikannya dapat di lihat pada Tabel Berikut, Sumber Pemerintah Desa.....	53
Tabel 4.17	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Khusus	53
Tabel 4.18	Ekonomi Yang di Bina Oleh Desa, Sumber Pemerintah Desa	54
Tabel 4.19	Potensi Hasil Pengrajin dan Industri Kecil, Sumber Pemerintah Desa	54
Tabel 4.20	Berdasarkan Mata Pencarian di Desa Bojong Gede Tahun 2021, Sumber Pemerintah Desa.....	55
Tabel 4.21	Berdasarkan Tempat dan Fasilitas Usaha di Desa Bojong Gede Tahun 2021, Sumber Pemerintah Desa.....	56
Tabel 4.22	Potensi Hasil Peternakan.....	57

Tabel 4.23	Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Desa Bojong Gede, Sumber Pemerintah Desa.....	57
Tabel 4.24	Infrastruktur Pembangunan/Bidang Kesehatan	58
Tabel 4.25	Bidang Pendidikan	58
Tabel 4.26	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Sekertariat, Sumber Pemerintah Desa	59
Tabel 4.27	Sarana Kehutanan dan Lingkungan Hidup	59
Tabel 4.28	Sarana Pemukiman Milik Desa.....	59
Tabel 4.30	Sarana Perhubungan Komunikasi dan Informatika	60
Tabel 4.31	Sarana Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sumber Pemerintah Desa	60
Tabel 4.32	Sarana/Ibadah.....	60
Tabel 4.33	Sarana Kebudayaan.....	60
Tabel 4.34	Sarana Kepemudaan dan Olahraga	61
Tabel 4.35	Sarana Kelembagaan Masyarakat	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	29
Gambar 3.1 Peta Desa Bojong Gede.....	34
Gambar 3.2 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	40
Gambar 3.3 Triangulasi Teknik Wawancara dan Sumber Data.....	43
Gambar 3.4 Foto Pada Saat Mengurus Surat Izin Penelitian di Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor	94
Gambar 3.5 Wawancara Informan pertama sebagai Sekretaris Desa Mewakili Kepala Desa Bojong Bede	95
Gambar 3.6 Foto Bersama Ibu Ketua PKK Desa Bojong Gede.....	96
Gambar 3.7 Wawancara Kepala Dusun Bojong Gede sebagai Informan Kedua 2023	97
Gambar 3.8 Wawancara Wakil Ketua UMKM Desa Bojong Gede Sebagai Informan Ke Tiga 2023.....	98
Gambar 3.9 Wawancara Masyarakat dan Perangkat Desa Bojong Gede 2023 ...	99

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Observasi.....	78
Lampiran 2. Pedoman Wawancara.....	81
Lampiran 3. Transkrip Wawancara	86
Lampiran 4. Surta Izin Penelitian Dari Kampus STIP-AN.....	100
Lampiran 5. Rekomendasi Penelitian Dari Kesbangpol Kabupaten Bogor	101
Lampiran 6. Tanda Terima Surat Dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Bogor 102	
Lampiran 7. Rekomendasi Penelitian Dari Kecamatan Bojong Gede	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang selama ini telah mengalami empat kali masa perubahan, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, oleh sebab itu Pemerintah Indonesia memprioritaskan pemerintahan desa agar dapat berkembang dalam berbagai bentuk sehingga pemerintahan desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, makmur, maju dan mandiri.

Desa memiliki posisi yang sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 78 Ayat 1 tentang pembangunan desa, bertujuan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi serta pemanfaatan ekonomi lokal Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan secara berkelanjutan, Ayat 2 pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, Ayat 3 pembangunan desa sebagai mana dimaksud pada Ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengaruh rasa aman, perdamaian dan keadilan sosial.

(Kusumastuti ; 2021, Peran Koperasi Dalam Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Pada UMKM di Indonesia. *Unisri Press*).

Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tongkat strategis untuk keberhasilan semua program karena itu upaya memperkuat desa, (Pemerintah desa dan lembaga masyarakat) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya, pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat strategis, yaitu khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik, maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa, pelaksanaan tugas aparat pemerintah desa yang berkualitas tentu akan mendukung tercapainya pelaksanaan pembangunan yang optimal, karena aparat pemerintah desa merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pemerintahan yang ada di desa. (Pelu, A., Madubun, J, & Wance, M.2023. Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintahan).

Dan untuk mewujudkan pemberdayaan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif oleh karena itu pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggungjawab dan demokrasi.

Sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama, peran pemerintah desa sebagai administrator maka dalam pelaksanaannya harus menjadi sumber inovasi bagi pembinaan gagasan dan strategi yang menunjang pembaharuan dan pembangunan, karena pemerintah desa berperan penting dalam maju atau tidaknya suatu desa, demikian kemajuan itu sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan desa.

Pemerintah desa bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu dengan tidak melanggar ketentuan hukum yaitu perundang-undangan, program yang dapat diperankan oleh pemerintah desa yaitu, terkait dengan peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia SDM, dan pelibatan masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan pedesaan.

Perlu diketahui bahwa, hakikat pembangunan yang komperhensif adalah, meletakkan fondasi atau penopang yang kokoh yaitu, peranan pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan diwilayah pedesaan tentunya dengan melibatkan masyarakat desa.

Banyak orang di Indonesia yang belum menyadari bahwa, desa memiliki potensi yang sangat besar untuk digali, masyarakat cenderung lebih memilih pindah ke kota untuk mendapatkan pekerjaan yg lebih menguntungkan secara finansial, padahal jika diteliti lagi ada juga rakyat pedesaan yang sukses dari membuka Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di desa bahkan, saat ini UMKM dianggap sebagai tulang punggung negara Indonesia karena mampu

menambah nilai Produk Domestik Bruto (PDB) secara signifikan . (Jurnal Kajian Ilmu Pemerintahan,2, 124-139).

Meningkat atau menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya keterlibatan UMKM sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal (33) Ayat 4, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. (Y Abdi, BA Batubara-Altafani, 2022-jurnal.islahiyah.ac.id).

UMKM desa mempunyai peran cukup strategis pada pembangunan ekonomi dalam skala nasional, selain diperkotaan, UMKM desa juga dipandang mempunyai prospek yang bagus dimasa mendatang bahkan, pemerintah pun selalu mendorong UMKM dirana pedesaan untuk bisa maju dan bersaing dengan jenis usaha lainnya dalam kancah internasional, tentu saja tidak terlepas dari manfaat dan perannya untuk perekonomian, UMKM yang dijalankan dipedesaan ternyata mempunyai berbagai manfaat, terutama untuk perekonomian nasional, beberapa diantaranya dapat menyumbang nilai PDB di Indonesia, bahkan UMKM desa merupakan salah satu penyumbang terbesarnya. (Wardiningsih Yasin,2022-jurnal.yasin-alsys.org).

UMKM desa juga bisa menjadi solusi yang efektif dalam permasalahan ekonomi pada kelas kecil sampai menengah, tak hanya itu saja, UMKM di desa juga mampu mengurangi pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan yang baru.

Itulah manfaat UMKM desa untuk perekonomian nasional, namun selain itu, ada juga manfaat lain yang diberikan oleh pelaku UMKM terutama untuk dirinya sendiri, diantaranya;

1. Lebih bebas secara finansial
2. Sebagai bentuk pengabdian diri serta bisa memperoleh pengakuan atas usaha yang dijalani
3. Seseorang memiliki kemampuan dalam mengontrol diri sendiri.
4. Dapat menggali potensi yang ada didalam dirinya
5. Bisa lebih mudah beradaptasi terhadap tuntutan zaman
6. Menjadi penggerak perekonomian masyarakat dengan lebih fleksibel dan inovatif. (Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo, 7(1), 73-85).

Pemerintah selalu mendukung adanya UMKM desa dengan melakukan program pengembangan UMKM, tujuan dari program tersebut adalah agar para pelaku bisa mengembangkan keterampilan dalam berwirausaha, serta bisa mempunyai kemampuan dalam menjalankan usaha kecil serta menengah.

Program tersebut juga melatih pengusaha untuk bisa menerapkan keterampilan kewirausahaan, mengidentifikasi, serta memilih proyek bisnis dan bisa mempersiapkan perencanaan bisnis yang dapat dipresentasikan pada lembaga keuangan. UMKM sebagai salah satu program yang sangat diperhatikan oleh pemerintah diwadahi secara khusus, melalui Kementerian Koperasi dan UKM, berbagai program dilaksanakan untuk membantu UMKM terus berkembang dan bisa memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi, yang langsung

pada kehidupan masyarakat kalangan bawah. (R Agustina,YS Dwanoko, D Suprianto Jurnal *Aplikasi Dan Inovasi Ipteks*. 4 (1), 69-76).

Hal tersebut dikarenakan UMKM desa mempunyai tiga peran yang sangat penting, diantaranya;

1. Menjadi sarana untuk mengentaskan kemiskinan ; pentingnya UMKM desa yang pertama adalah, menjadi sarana untuk mengentaskan masyarakat kecil terhadap kemiskinan yang menjeratnya, sebab, seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa penyerapan tenaga kerja dari UMKM memang cenderung tinggi, ditahun 2011 sendiri, menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan, jika 55,2 juta unit UMKM bisa menyerap tenaga kerja sebesar 101,7 juta jiwa, andaikan angka tersebut terjadi disetiap tahunnya, maka kemungkinan besar penyerapan tenaga kerja UMKM di Indonesia akan terus semakin membaik dan juga dapat memperbaiki angka pengangguran serta mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan.
2. Memberi pemasukan devisa untuk negara ; UMKM juga sangat penting dalam menyumbang pemasukan untuk negara yakni dalam bentuk devisa, hal ini dikarenakan pasar-pasar UMKM sudah merambah ke skala internasional, angka devisa dari UMKM bahkan mencapai 88,45 miliar rupiah dan terus meningkat berkali-kali lipat.
3. Memeratakan tingkat ekonomi rakyat ; UMKM memang berbeda dengan bisnis skala yang besar, sebab lokasinya berbeda-beda bahkan hingga ke

daerah yang cukup jauh jangkauannya, dengan UMKM yang ada pada 37 provinsi, maka jurang ekonomi diberbagai daerah dapat diatasi dan masyarakat pun tidak perlu berbondong-bondong ke kota untuk memperoleh kehidupan dan gaji yang lebih tinggi. (S Sugianti, R Ferawati, AP Hafiz UIN Sulthan Thaha Saifuddin 21 2019).

UMKM sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia, UMKM memiliki peran yang signifikan yaitu sebagai berikut :

UMKM memiliki kontribusi besar terhadap PDB yaitu 61,97% dari total PDB nasional atau setara dengan Rp. 8.500 triliun pada tahun 2020.

UMKM menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar yaitu 97% dari daya serap dunia usaha pada tahun 2020, jumlah UMKM yang banyak berbanding lurus dengan banyaknya lapangan pekerjaan di Indonesia sehingga UMKM memiliki andil besar dalam penyerapan tenaga kerja. (Jurnal *Ekonomi Modernisasi*, Mohamad Nur Singgih University Of Merdeka Malang (3), 2018-227).

Kristiyanti (2012), juga menjabarkan langkah-langkah strategis agar UMKM mampu bersaing dimasa mendatang, langkah-langkah tersebut antara lain dengan cara menciptakan iklim usaha yang kondusif, memberikan bantuan permodalan, memberikan perlindungan usaha, mengembangkan kemitraan, memberikan pelatihan, membentuk lembaga khusus, memantapkan asosiasi, mengembangkan promosi, mengembangkan kerjasama yang setara dan mengembangkan sarana dan prasarana.

Strategi pengembangan lingkungan usaha yang kondusif bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing KUMKM dengan menciptakan peluang usaha seluas-luasnya menghilangkan biaya ekonomi tinggi, serta menjamin adanya mekanisme pasar yang sehat.

Kebijakan pengembangan lingkungan usaha yang kondusif bagi KUMKM tidak berada pada suatu instansi tertentu dan cenderung tersebar pada berbagai instansi, untuk itu kordinasi dan sinergitas dengan instansi lain untuk menumbuhkan iklim berusaha yang kondusif bagi KUMKM, memerlukan adanya landasan peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan pelaksanaannya, yang memungkinkan KUMKM bersaing secara sehat dengan pelaku usaha lainnya.

Pengembangan lingkungan usaha memiliki spektrum yang luas dan mencakup kebijakan politik, hukum, ekonomi makro, kerjasama internasional dan kebijakan pembangunan daerah serta perijinan yang bersifat lintas sektoral, kementerian koperasi dan UKM akan mendorong lahirnya kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang pro pengembangan KUMKM.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ; Dari total keseluruhan jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 64,13 juta merupakan UMKM yang masih berada disektor informal, sehingga perlu didorong untuk bertransformasi ke sektor formal, Indonesia masih memiliki kendala dalam perizinan yang rumit serta tumpang tindih antara regulasi ditingkat pusat dan daerah.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengakomodir permasalahan tersebut melalui penyusunan UU cipta kerja yang telah disahkan pada tahun 2020, salah satu substansi yang diatur adalah, mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM, pemerintah berharap melalui UU cipta kerja UMKM dapat terus berkembang dan berdaya saing.

Jenis UMKM Desa Yang Menopang Perekonomian Rakyat

Yaitu dengan membuka usaha peternakan ayam dipedesaan dengan alamnya yang masih terjaga tentu menjadi lahan yang cocok bagi pengusaha UMKM untuk mulai melakukan kegiatan peternakan, salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah berternak ayam, sebab ayam merupakan salah satu daging hewan yang paling banyak dicari di Indonesia, permintaan ayam pun tidak pernah sepi dipasaran terutama menjelang hari-hari khusus seperti lebaran, natalan dan tahun baru dan lain-lain.

Ada dua cara untuk beternak ayam, yakni dengan cara intensif dan semi intensif, cara intensif adalah ayam kampung yang ada pada kandang setiap harinya, sedangkan semi intensif adalah beternak ayam potong dengan membuat kandang yang luas sehingga anda lebih mudah mengontrol kesehatan dan pertumbuhannya. (Sumber,berdesa ekonomi nasional, 7 Juni 2020).

Usaha, adalah suatu unit ekonomi yang melakukan aktivitas dengan tujuan, menghasilkan barang/jasa untuk dijual atau ditukar dengan barang lain, dan ada seseorang atau lebih yang bertanggungjawab dan punya kewenangan untuk

mengelola usaha tersebut, kewenangan yang dimaksud, meliputi kewenangan dibidang kepegawaian, pemasaran, keuangan dan sebagainya.

Jadi usaha dapat berupa perusahaan tunggal, kantor pusat/induk, kantor cabang/perwakilan, unit produksi seperti pabrik, atau unit-unit penunjang dan unit pembantu seperti gudang, kantor pemasaran, atau kantor tempat melakukan aktivitas perusahaan lainnya yang berlokasi terpisah dari kantor induknya.

Ekonomi, adalah suatu kegiatan atau bagian dari kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa yang secara langsung atau tidak langsung dimaksudkan untuk pencapaian tujuan komersial.

Jenis kegiatan usaha dan kegiatan utama, adalah kegiatan yang mempunyai nilai pendapatan paling besar diantara beberapa jenis kegiatan dalam suatu perusahaan/usaha, apabila suatu perusahaan/usaha hanya melakukan suatu jenis kegiatan, maka jenis kegiatan tersebut merupakan, jenis kegiatan utama dari perusahaan/usaha tersebut.

Koperasi, adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

1.2 Identifikasi Masalah

Pada peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui UMKM di Desa Bojong Gede, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diidentifikasi, antara lain ;

1. Peran pemerintah desa dalam mendukung pengembangan UMKM kepada masyarakat di Desa Bojong Gede.
2. Kelompok UMKM yang dibentuk oleh pemerintah Desa Bojong Gede.
3. kesejahteraan ekonomi masyarakat.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa pembatasan yang perlu diperhatikan:

1. Fokus pada Peran Pemerintah Desa : Dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui UMKM di desa Bojong Gede.
2. Keterbatasan Sampel : Penelitian ini akan menggunakan sampel yang terbatas, tergantung pada jumlah dan ketersediaan responden yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini.
3. Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya : Penelitian ini akan dilakukan dalam batasan waktu dan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap semua aspek yang relevan mungkin tidak dapat dilakukan sepenuhnya.

Meskipun ada pembatasan ini, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang berharga tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui UMKM, dengan memahami pembatasan ini, hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan studi lebih lanjut dan perbaikan kebijakan di masa depan.

1.4 Perumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui UMKM di Desa Bojong Gede?
2. Apa saja Faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Desa Bojong Gede?
3. Bagaimana upaya pemerintah desa Bojong Gede dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Desa Bojong Gede agar terus berkembang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan diatas maka, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui UMKM di Desa Bojong Gede.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Desa Bojong Gede.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah desa Bojong Gede dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui UMKM agar terus berkembang.

Dengan merumuskan permasalahan dan tujuan penelitian ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui UMKM, serta memberikan saran dan masukan yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik di Desa Bojong Gede.

1.6 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna seperti yang dimaksud dibawah ini:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini memiliki kegunaan untuk mengembangkan ilmu pemerintahan dan sumber daya aparatur pemerintah dibidang ilmu pemerintahan khususnya pemerintah desa dalam melayani masyarakat desa.
2. Secara peraktik, diharapkan penelitian ini dapat berguna dan dapat diaplikasikan di desa lain.
3. Secara pribadi untuk menambah wawasan bagi mahasiswa tersebut dalam.
 - a. Pemahaman mendalam tentang topik penelitian.
 - b. Keterampilan penelitian, merancang, menyimpulkan data dan menganalisis hasil penelitian.
 - c. kemampuan analisis dan kritis dalam menganalisis informasi, menyusun argumentasi dan pemikiran yang rasional.

- d. keterampilan penulisan, menyusun argumen yang kompleks, merumuskan hipotesis dan menyampaikan temuan penelitian dengan jelas dalam bentuk tulisan.
- e. kemampuan komunikasi dengan bahasa yang jelas.
- f. pemecahan masalah dalam menghadapi tantangan.
- g. peningkatan disiplin diri.
- h. kepercayaan diri dalam pencapaian hasil karya.
- b) i. etika penelitian, menghormati hak cipta plegalisiran dan integritas seseorang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis

Pemerintah Desa dan Pemerintahan Desa

Pemerintah desa, adalah mereka yang bertugas untuk mengatur dan melaksanakan pemerintahan ditingkat desa, yang dikepalai oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pemerintahan desa, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat atau desa, pemerintahan ini dilaksanakan berdasarkan atas dua faktor, yakni dari faktor asal-usul dan adat istiadat setempat, yang mana keduanya diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), jadi dalam hal ini perangkat desa yang bertugas dalam pemerintahan desa dianggap sah dimata hukum. (Arsjad, M.F.(2018).Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa, *Gorontalo Journal of Public Administration Studies* (1) 16-32).

Setiono (2011: 494) Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya dengan posisi tersebut, desa memiliki peranan penting dalam

menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas, bahkan desa merupakan garda terdepan dalam mengapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah pusat dan daerah.

Bisa disimpulkan bahwa, pemerintah desa merujuk pada pelaksana atau orang yang bertugas melaksanakan, sedangkan pemerintahan desa adalah proses menjalankan tugas dari perangkat desa yang terdiri atas beberapa bagian, yakni perangkat desa dipimpin oleh kepala desa yang posisinya sejajar dengan BPD atau Badan Penyelenggara Daerah, keduanya merupakan puncak pemerintahan dimana kepala desa adalah petugas pelaksana pemerintahan, dibawah kepala desa terdapat Sekretaris Desa (SEKDES) yang juga mengepalai beberapa bidang tata usaha yang ada dibawahnya, keberadaan tata usaha ini didasarkan pada kebutuhan masing masing desa.

Sekretaris desa atau sekdes, dibawahnya terbagi menjadi dua yakni unsur pelaksana teknis lapangan serta unsur kewilayahan, untuk unsur pelaksana teknis lapangan terdapat beberapa kepala yakni, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan kesejahteraan rakyat, kepalah urusan keuangan, dan kepala urusan umum, para kepala urusan tersebut sering disebut sebagai (KAUR) dibeberapa daerah. Sedangkan untuk unsur kewilayahan untuk melengkapi pengertian pemerintah desa, terdapat kepala dusun (KADUS) yang mana jumlahnya bergantung kepada luas desa dan banyaknya dusun didalamnya.

Dalam melaksanakan pemerintahan desa, terdapat tiga buah hubungan, yakni hubungan komando, seperti dari kepala desa kepada kaur atau kepala dusun, yang keduanya adalah hubungan kordinasi yakni pada kepala desa pada BPD, dan

yang terakhir adalah garis hubungan konsultatif yakni dari tata usaha pada kaur dan juga kepala dusun. Sumber ; (Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, *Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa*).

Pengertian Peran dan Peranan

Menurut definisi para ahli menyatakan bahwa, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status, seseorang melaksanakan hak dan kewajiban berarti telah menjalankan suatu peran.

Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai sebuah proses, peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup 3 (tiga) hal antara lain ;

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang didalam masyarakat.
2. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.
3. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Soekanto (2002: 243) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Kartono (2011: 69) Peranan adalah suatu kemampuan seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan. sebagai seorang pemimpin apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam

menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya sehingga akan membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Jadi berdasarkan penjabaran tentang peran dan peranan yang dimaksudkan tidak hanya tentang jabatan semata seseorang yang harus dihormati masyarakat, tetapi juga peran seseorang harus mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat baik dari segi peningkatan kesejahteraan ekonomi maupun Sumber Daya Manusia (SDM), dan harus memperhatikan keamanan dan kedamaian masyarakat dengan merangkul setiap masyarakat tanpa memandang status sosial seseorang agar terciptanya harmonisasi antara pemerintah desa dengan masyarakat setempat.

Pemimpin dan Kepemimpinan

Pemimpin dan kepemimpinan merupakan dua elemen yang saling berkaitan artinya kepemimpinan atau (*style of the leader*) merupakan cerminan dari karakter atau perilaku pemimpinnya (*leader behavior*) perpaduan atau sintesis antara (*leader behavior* dengan *leader style*) merupakan kunci keberhasilan pengelolaan organisasi, atau dalam skala yang lebih luas adalah pengelolaan daerah atau wilayah dan bahkan negara, pemimpin (*leader*) adalah seorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya, memotivasi dan mengarahkan bawahan untuk melaksanakan sebagian pekerjaan mencapai tujuan organisasi.

Suradinata (1997:11) Pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok dua orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga, sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin,

mempengaruhi pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengertian Pemerintahan dan Pemerintah Secara Umum

Wirjono Prodjodikoro dalam Munaf, Yusri (2016: 77) pemerintah dapat dibagi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yaitu lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur secara langsung oleh UUD 1945 maupun oleh lembaga-lembaga yang diatur oleh UU. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah Presiden/eksekutif.

C.F.Strong (2014: 10) Pemerintahan dalam arti luas, adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.

Napitupulu (2012: 9) Pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara, *Government* dari bahasa Inggris dan *Gouvernement* dari bahasa Perancis yang keduanya berasal dari bahasa Latin, yaitu *Gubernaculum* yang berarti kemudi, tetapi diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi pemerintah atau pemerintahan dan terkadang juga menjadi penguasa.

Teori Birokrasi

Fritz Morstein Marx (1984) Birokrasi merupakan suatu tipe organisasi yang digunakan oleh pemerintah moderen untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat spesialis, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah.

Kata birokrasi sendiri pada awalnya berasal dari kata legal-rasional, dimana sebuah organisasi yang ada itu legal, karena memiliki wewenang yang berasal dari seperangkat aturan prosedur serta peranan yang telah dirumuskan secara jelas serta detail, organisasi juga disebut rasional dalam menetapkan tujuan serta perancangan organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai tersebut.

Pengertian Organisasi

Robbins (1994: 4) Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Organisasi merupakan sebuah kesatuan sosial yang terbentuk dari adanya sekelompok individu yang saling berinteraksi antara satu sama lain yang membentuk suatu pola yang terstruktur dengan cara tertentu yang membuat setiap anggota yang ada di dalamnya memiliki tugas serta fungsinya masing-masing, menjadi kesatuan yang memiliki tujuan tertentu serta memiliki batas-batas yang jelas sehingga organisasi tersebut dapat secara tegas dipisahkan dari lingkungannya.

Definisi Usaha

Usaha adalah sebuah bisnis yang menghasilkan keuntungan tertentu yang dijalankan dengan modal yang digunakan untuk membuat usaha, di dalam sebuah usaha terdapat beberapa faktor penting salah satunya adalah potensi dan peluang usaha, dengan memahami hal tersebut kita juga bisa paham bagaimana cara menjalankan usaha yang benar dan memahami keinginan konsumen yang dinamis serta menyikapi persaingan usaha dengan bijak, hal tersebut penting karena potensi dan peluang usaha adalah kombinasi yang apik dalam memulai sebuah usaha yang menarik.

Usaha merupakan bentuk pekerjaan yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus agar mendapat keuntungan, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, didirikan dan berkedudukan disuatu tempat. (Octavia,A.(2020).Jaya Samarinda. Learning Society: Jurnal CSR, Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, (1), 29-43).

Harmaizar. Z (20 : 77) dalam merintis usaha baru, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ,beberapa bidang usaha yang bisa dijalankan diantaranya ;

- a. Bidang usaha pertanian, meliputi usaha pertanian, kehutanan, perikanan dan agrobisnis
- b. Bidang usaha perdagangan, meliputi usaha perdagangan kecil (ritel), grosir, agen, membuka usaha restoran, dan perdagangan lainnya

- c. Bidang usaha jasa keuangan, meliputi usaha perbankan, asuransi dan koperasi
- d. Bidang usaha jasa perorangan, meliputi usaha pangkas rambut, salon, penatu, percetakan, fotokopi, dan sablon
- e. Bidang usaha wisata, meliputi usaha jasa pariwisata, pengusahaan objek dan daya tari wisata dan usaha sarana wisata. (Hendro.2011.VOL-1 NO 1 (2020) Dasar-dasar Kewirausahaan. Jakarta : Erlangga).

Teori UMKM Menurut Ahli Secara Garis Besar

Inna Primiana (21 Maret 2022), UMKM adalah penggerak utama yang dapat membantu membangun Indonesia, menurut Primiana, usaha mikro sendiri bisa diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Contohnya seperti agraris, industri manufaktur, agribisnis dan sumber daya manusia.

M.Thoha, (1997:7) Yang dimaksud dengan pengembangan UMKM adalah suatu tindakan atau proses untuk memajukan kondisi UMKM ke arah yang lebih baik, sehingga UMKM dapat lebih baik menyesuaikan dengan teknologi, pasar, dan tantangan yang baru serta perputaran yang cepat dari perubahan yang terjadi.

UMKM merupakan bisnis berskala kecil, bisa dijalankan oleh perseorangan, rumah tangga, hingga badan usaha seperti (BUMN), (BUMD) dan (BUMDES) pada dasar nyai, mulai dari ciri-ciri hingga pengertiannya, usaha mikro ini bisa kita lihat di dalam UU nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Kecil dan Menengah. Di dalam UU tersebut pemerintah sudah menetapkan secara lengkap terkait usaha tersebut.

Pengertian Ilmu Ekonomi

Teori Ekonomi Aplikasi

Adalah cabang dari ilmu ekonomi mikro dan makro, ilmu ini bertujuan menganalisa dan menelaah tentang hal-hal yang perlu dilakukan mengenai suatu kejadian dalam perekonomian, misalkan ekonomi moneter membahas dan memberikan masukan kepada pelaku ekonomi tentang bagaimana caranya mengelola uang dan mengatasi inflasi dengan menggunakan teori ekonomi baku yaitu teori ekonomi makro. (Oleh Iskandar Putong, 2015;11,*Buku Teori Ekonomi Mikro dan Pengertian Ekonomi*).

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat UMKM diantaranya:

1. Jurnal Hanna Fitriyati, dengan judul “Strategi Pemberdayaan UMKM di Indonesia”.

Dalam penelitiannya menerangkan bahwa, UMKM memiliki kekuatan dan ketahanan yang lebih baik dibanding dengan ekonomi konglomerat, karena mampu bertahan dan mendongkrak perekonomian nasional dari kebangkrutan, dalam penelitian ini mengemukakan beberapa permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM diantaranya ;

- a. Keterbatasan modal
- b. Kesulitan pemasaran
- c. Kesulitan terhadap bahan baku
- d. Kurangnya keterampilan SDM
- e. Teknologi yang digunakan dan
- f. Kemampuan manajerial yang rendah.

Penelitian ini juga mengemukakan beberapa strategi pemberdayaan UMKM diantaranya.

- a. Strategi peningkatan iklim usaha yang kondusif
- b. Strategi peningkatan aset kepada sumber daya produktif
- c. Strategi pengembangan produk dan pemasaran

d. Strategi peningkatan daya saing SDM. (Sumber oleh: Yanivi Bachtiar dan Christine. Jakarta: Salemba Empat, 2007 ; hal.13).

2. Jurnal Sudaryanto, dengan judul “Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean”.

Dalam penelitian ini menyatakan strategi untuk mengembangkan UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit, saat ini sistim kredit yang sangat familiar dimasyarakat adalah.

- a. Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dengan kategori usaha layak, tanpa agunan.
- b. Penguatan lembaga pendamping UMKM dapat dilakukan melalui kemudahan akses serta peningkatan *capacity building* dalam bentuk pelatihan dan kegiatan penelitian yang menunjang pemberian kredit kepada UMKM.
- c. Selain itu strategi untuk mengantisipasi mekanisme pasar yang makin terbuka dan kompetitif khususnya dikawasan asean adalah penguasaan pasar, yang merupakan prasyarat untuk meningkatkan daya saing UMKM agar dapat menguasai pasar.

Maka UMKM perlu mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat, baik informasi mengenai pasar produksi maupun pasar faktor produksi, untuk memperluas jaringan pemasaran produk yang dihasilkan oleh UMKM, aplikasi teknologi informasi pada UMKM akan mempermudah UMKM dalam memperluas pasar baik didalam negeri maupun pasar luar negeri dengan efisien, pembentukan pusat

pengembangan UMKM berbasis IT dianggap mampu mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM di era teknologi informasi saat ini. (Sumber oleh : Sudaryanto,R & Wijayanti (2013). *Strategi pemberdayaan UMKM menghadapi pasar bebas Asean. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. Badan Kebijakan Fiskal. Kementerian Keuangan, Jakarta*).

Hasil penelitian diatas merupakan jurnal/referensi yang relevan dengan penelitian ini, akan tetapi perbedaan dan kesamaan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada lokus penelitian, serta tahun penelitian yang mana dalam penelitian ini peneliti mengambil lokus di Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

2.3 Kerangka Pemikiran dan Operasional Konsep

2.4 Kerangka Pemikiran

Pemerintah negara Indonesia telah memberikan atensi kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus wilayah desanya secara mandiri dalam bingkai NKRI, dengan tujuan agar pemerintah desa bebas bereksprersi dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakatnya serta kesejahteraan untuk kemakmuran masyarakat desa secara mandiri.

a) Faktor Pendukung, sebagaimana telah diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, untuk itu sangatlah penting bagi peran pemerintah desa dalam memajukan perekonomian desanya dalam mendorong masyarakat untuk terlibat langsung disetiap kebijakan atau program-program pembangunan fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh pemerintah desa, baik dalam kegiatan memajukan perekonomian desa maupun dalam mendorong UMKM di desa.

Karena UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

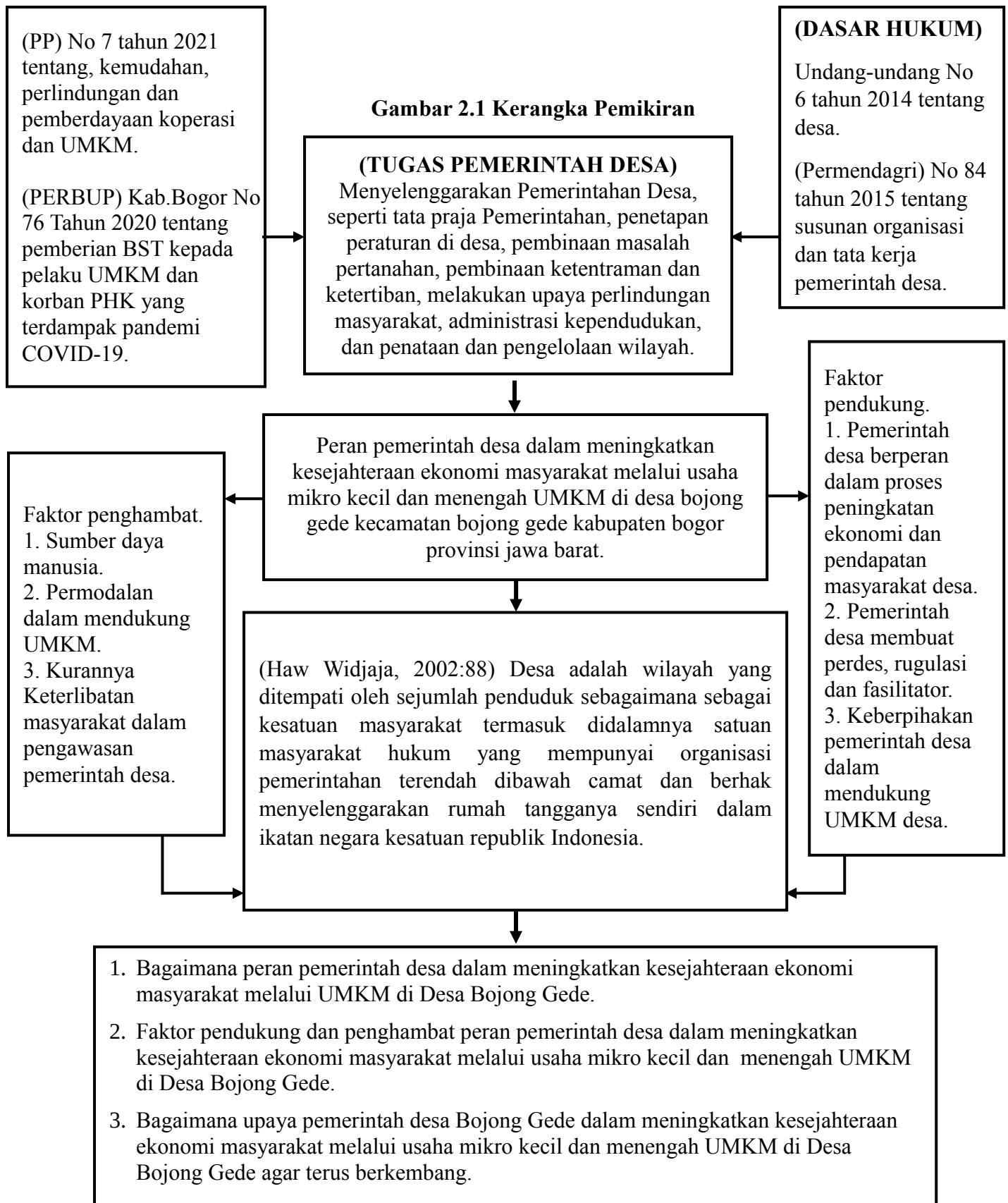
Selain itu UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya, sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada

kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

b) Faktor Penghambat, meskipun UMKM telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal;

- 1) Produksi dan pengolahan
- 2) Pemasaran
- 3) Sumber daya manusia
- 4) Desain dan teknologi
- 5) Permodalan
- 6) Serta iklim usaha untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan UMKM.

Pemerintah telah berupaya dengan membuat berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan dan pengembangannya namun belum optimal hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan kepastian berusaha dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan UMKM, dalam pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama, oleh masyarakat dan pemerintah.



2.5 Operasional Konsep

Soekanto (2001 : 242), yang dimaksud dengan operasional konsep adalah cara untuk mendefinisikan sebuah konsep agar bisa diukur, operasional konsep diperlukan untuk memberikan batasan terhadap konsep teoritis hal ini sangat perlu agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami penelitian.

Adapun gejala konsep peran dalam penelitian ini, indikasinya dapat diukur dengan sebagai mana dalam tabel:

Table 2.1 Operasional Konsep

KONSEP	VARIABEL	DIMENSI	INDIKATOR
- Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui UMKM di desa bojong gede. - Menurut Sugiyono (2012: 224), Teknik pengumpulan data. - Lincoin dan Guba dalam (Sugiyono, 2009: 76), 7 langkah penggunaan wawancara dalam mengumpulkan data penelitian kualitatif - Menurut Miles dan Huberman dalam sutopo (2006:16), reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.	Peran pemerintah desa	1) Kebijakan Pemerintah Desa Untuk Mendorong UMKM.	- Fasilitas - Pelatihan - Bantuan Modal
		2) Dukungan Modal Kepada Kelompok UMKM. 3) Membuat Perdes, Regulasi dan selaku Fasilitator.	- Besaran Anggaran Untuk Mendukung UMKM - Tingkat Partisipasi UMKM

2.6 Hipotesis

Sulistiyastuti (2007:137), hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah (belum tentu kebenarannya) sehingga harus diuji secara empiris.

1. Pemerintah desa mempunyai peran yang sangat strategis, khususnya dibidang pelayanan publik, Perlu diketahui bahwa, hakikat pembangunan yang komprehensif adalah, meletakkan fondasi atau penopang yang kokoh yaitu, pada peranan pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan diwilayah pedesaan tentunya dengan melibatkan masyarakat desa.

2. Faktor pendukung dan penghambat, Pemerintah desa dalam menjalankan perannya tentunya tidak terlepas dari berbagai hambatan dalam membangun desanya, terutama dalam pembangunan ekonomi desa, salah satu substansi agar pemerintah desa bisa mendorong ekonomi desa yaitu dengan mendorong UMKM desa agar bisa berkembang.

- a. Faktor pendukung, memberikan dukungan modal kepada pelaku UMKM.
- b. Membuat rugulasi atau PERDES.
- c. Membuat kebijakan untuk mendukung usaha masyarakat.
- d. Faktor Penghambat, yaitu kurangnya tingkat partisipasi masyarakat.
- e. Kurangnya pemahaman pengelolaan bantuan permodalan.

karena pemerintah desa berperan penting dalam maju atau tidaknya suatu desa, demikian kemajuan itu sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan desa.

3. Upaya pemerintah desa, dalam meningkatkan perekonomian desa dengan melibatkan seluruh masyarakat untuk turut serta dalam membangun desa baik dari aspek pembangunan infrastruktur, ekonomi maupun pemberdayaan UMKM, untuk itu pelaksanaan tugas aparat pemerintah desa yang berkualitas tentu akan mendukung tercapainya pelaksanaan pembangunan yang optimal, karena aparat pemerintah desa merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pemerintahan yang ada di desa. Sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama agar tercapainya visi dan misi desa.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data baik berupa lisan maupun tulisan dengan pendekatan studi lapangan.

Penelitian deskriptif, yaitu merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek, penelitian berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya. Oleh karena itu, dalam rangka mendapatkan data lapangan peneliti harus terjun langsung ke lapangan agar dapat mengamati secara langsung “peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui UMKM yang diteliti”.

Selanjutnya dalam kaitan penelitian ini berarti peneliti berusaha untuk mendeskripsikan dan memberikan penjelasan tentang “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui UMKM”, dengan proses yang terjadi dalam pola amatan dari faktor yang berhubungan.

3.2 Lokasi Dan Jadwal Penelitian

3.1.1 Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah lokasi dimana penelitian dilakukan, penetapan lokasi penelitian merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data primer. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaen Bogor Provinsi Jawa Barat.

Gambar 3.1 Peta Desa Bojong Gede
Sketsa Peta Bojong Gede



Sumber lokus-<http://1.bp.-bojonggede-bogor.JPG>

3.1.2 Jadwal Penelitian

Waktu penelitian yang akan dipakai biasanya memakan waktu cukup lama agar penelitian dapat dilakukan secara efisien dan efektif, maka jadwal penelitian harus direncanakan terlebih dahulu. Penelitian yang penulis lakukan telah terjadwal dalam beberapa tahap dan disertai dengan lamanya waktu penelitian yang dibutuhkan. Untuk lebih jelas dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Tahun 2022							Tahun 2023											
		Bulan							Bulan											
		6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Bimbingan Penyusunan Skripsi																			
2.	Penyusunan Usulan Penelitian(UP)																			
3.	Sidang Usulan Penelitian																			
4.	Revisi UP dan Pengurusan izin Penelitian																			
5.	Observasi Lapangan dan Penelitian																			
6.	Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian																			
7.	Sidang Komprehensif																			
8.	Perbaikan Skripsi																			
9.	Penyempurnaan Skripsi																			
10.	Wisudah Tahun 2023																			

Rencana Jadwal Penelitian Tentative

Sumber: Diolah Berdasarkan Kalender Akademik STIP-AN Tahun 2022/2023

3.3 Latar/Setting Penelitian

Latar penelitian ini adalah area dan kondisi dimana wawancara dan observasi dilakukan secara langsung, wawancara dilakukan ditempat dan waktu yang sebelumnya disepakati oleh informan, dimana peneliti sendiri yang langsung mengamati situasi/kondisi pemerintah desa dan masyarakat sesuai informasi yang diberikan oleh informan, khususnya mengenai peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui UMKM Didesa Bojonggede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini bagian dari proses wawancara yang akan berlangsung dengan narasumber guna mencari yang diteliti maka penulis membutuhkan alat pendukung serta teknik-teknik pengumpulan data tertentu yang disesuaikan dengan karakteristik penelitian yang akan dilakukan.

Menurut Sugiyono (2012: 224) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

3.1.3 Teknik Observasi

Observasi merupakan teknik yang mendasar dalam mengumpulkan data dalam penelitian, observasi dilakukan dengan pengamatan yang jelas, rinci, lengkap, dan sadar dalam keadaan tertentu, hasil dari observasi sendiri bisa berubah aktifitas, kejadian atau peristiwa, kondisi atau suasana tertentu, dan

perasaan emosi seseorang, observasi sangatlah penting dilakukan untuk memperoleh gambaran real suatu peristiwa atau kejadian demi menjawab pertanyaan dari si-peneliti, metode observasi yang digunakan untuk melihat perilaku dalam keadaan alamiah, melihat dinamika, gambaran perilaku berdasarkan situasi yang sesungguhnya.

3.1.4 Teknik Wawancara

Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal, wawancara penelitian lebih dari informal ke formal, walaupun semua percakapan mempunyai aturan peralihan tertentu atau kendali oleh salah satu informasi lainnya, menurut metodologi, bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu wawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Metode wawancara yang digunakan penulis yaitu wawancara terstruktur, dimana wawancara terstruktur adalah seluruh wawancara didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya, wawancara terstruktur mengacu pada situasi ketika seorang peneliti melontarkan sederet pertanyaan kepada responden berdasarkan kategori-kategori jawaban tertentu.

Lincoin dan Guba dalam (Sugiyono, 2009: 76) mengemukakan pada tuju (7) langkah penggunaan wawancara dalam mengumpulkan data penelitian kualitatif, yaitu :

1. Menetapkan pada siapa wawancara itu akan dilakukan;
2. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan;
3. Mengawali atau membuka alur wawancara;
4. Melangsungkan alur wawancara;
5. Mengonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya;
6. Menulis hasil wawancara kedalam catatan lapangan;
7. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang diperoleh.

Adapun informan yang penulis gunakan sebagai orang yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan. Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui UMKM di Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, terdiri dari 13 (orang) yakni :

Tabel 3.2 Daftar Informan

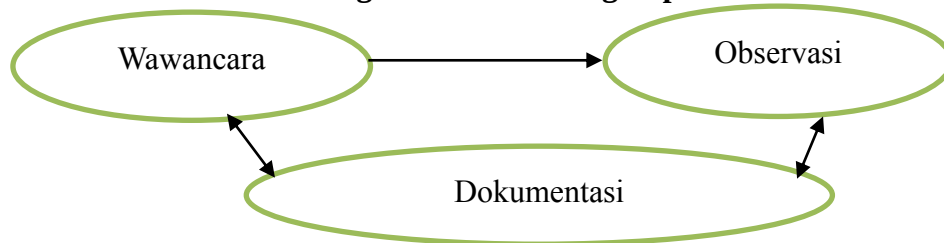
NO	INFORMAN	JUMLAH
1.	Kepala Desa Bojong Gede	1 Orang
2	Sekretaris Desa Bojong Gede	1 Orang
3.	BPD Bojong Gede	1 Orang
4.	Ketua PKK Bojong Gede	1 Orang
5.	Kepala Dusun	1 Orang
6.	Pelaku UMKM	3 Orang
7.	Masyarakat Desa Bojong Gede	5 Orang
TOTAL INFORMAN		13 Orang

3.1.5 Teknik Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, peraturan kebijakan, dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain, dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain.

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, data dengan dokumen ini biasanya dipakai untuk mengali informasi yang terjadi dimasa silam, peneliti perlu memiliki kepekaan untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna.

Gambar 3.2 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data



Sumber ; Lincoln dan Guba Dalam Sugiyono (2009:76)

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif.

Menurut Miles dan Huberman (2006:16) dalam model ini ada tiga (3) komponen analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus. Ketika kegiatan dalam analisis model interaktif dapat dijelaskan sebagai berikut :

Reduksi Data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis dilapangan, proses ini langsung terus menerus selama penelitian, reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data.

Penyajian Data

Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan

penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data.

Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semua belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud dan tujuan menguji kebenaran, kekokohan, dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.

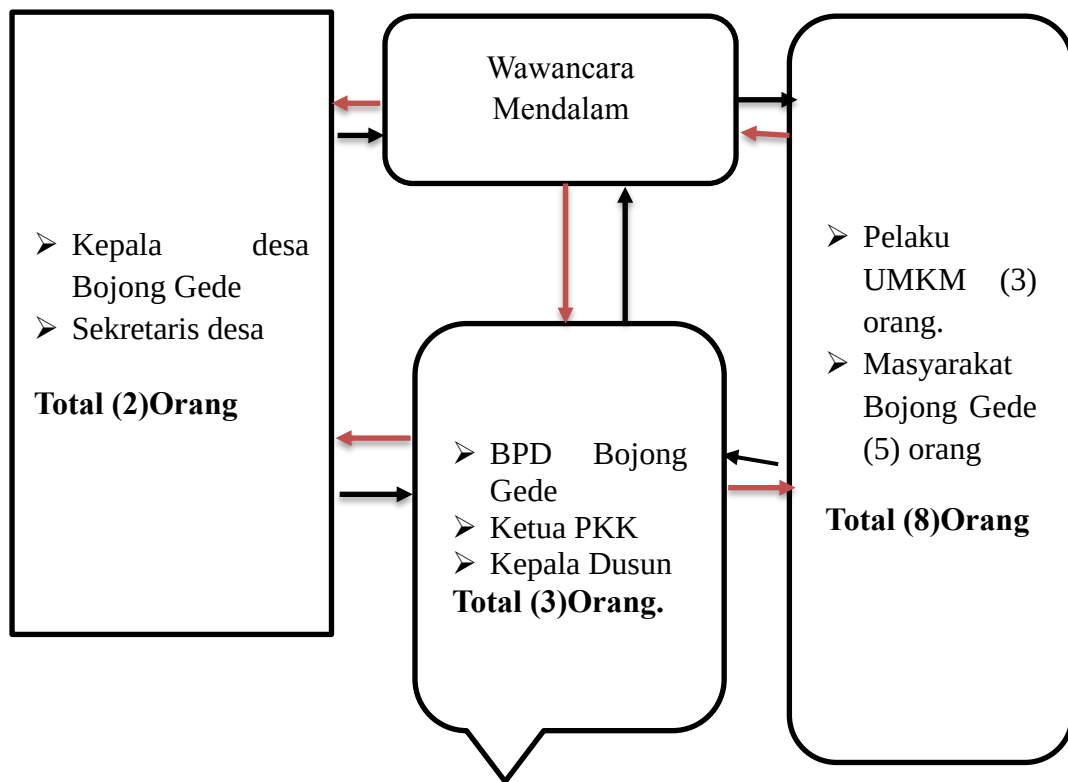
3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Kualitatif sebagai salah satu metode penelitian memiliki standarisasi tersendiri dalam menentukan tingkat kepercayaan sebuah data yang ditemukan dilapangan.pandangan umum mengenai data penelitian yang diperoleh dalam penelitian kualitatif yang cenderung individualistik dan dipengaruhi oleh subjektifitas peneliti menjadikan data penelitian ini cukup dipertanyakan objektivitasnya, tentunya hal ini juga tidak terlepas dari instrumen penelitian dan validasi penelitian sebagai instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri.

Didalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan validitas interval (*credibility*) pada aspek nilai kebenaran, pada penerapannya ditinjau dari validitas eksternal (*transferability*) pada aspek konsisten, serta objektiv (*confirmability*) pada aspek naturalis. Pada penelitian kualitatif, tingkat keabsahan lebih ditentukan pada data yang diperoleh. Melihat

hal tersebut maka kepercayaan data hasil penelitian dapat dikatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan sebuah peneliti, dengan teknik demikian dapat di gambarkan skemanya sebagai berikut;

Gambar 3.3 Triangulasi Teknik Wawancara dan Sumber Data



Sumber : Teknik Wawancara, Sugiyono (2014:48)

Terdiri dari 13 (Orang) yakni ;

NO	INFORMAN	JUMLAH
1.	Kepala Desa Bojong Gede	1 Orang
2.	Sekretaris Desa Bojong Gede	1 Orang
3.	BPD Bojong Gede	1 Orang
4.	Ketua PKK Bojong Gede	1 Orang
5.	Kepala Dusun	1 Orang
6.	Pelaku UMKM	3 Orang
7.	Masyarakat Desa Bojong Gede	5 Orang
TOTAL INFORMAN		13 Orang

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi/Lokus

4.2 Profil Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede

Desa Bojong Gede adalah sala satu desa di Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, dengan luas wilayah 275.72 Ha, Desa Bojong Gede terbagi menjadi 4 Dusun sebelum Tahun 2021, namun pada tahun 2021 desa Bojong Gede mejadi 5 Dusun diantaranya.

- a. Dusun I (Dusun Alas Tua)
- b. Dusun II (Dusun Pesanggarahan)
- c. Dusun III (Dusun Cibeurem)
- d. Dusun IV (Dusun Ciliwung)
- e. Dusun V (Dusun Kali Baru)

4.2.1 Kondisi Pemerintahan Desa Bojong Gede

Kondisi Pemerintahan Desa Bojong Gede Mengacu Kepada UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 59 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 109).

Tabel 4.1 Dengan Batas Wilayah Kerja Sebagai Berikut ;

Timur	:	Berbatasan dengan Desa Sukahati Kecamatan Cibinong
Barat	:	Berbatasan dengan Desa Sukmajaya Kecamatan Tajurhalang
Selatan	:	Berbatasan dengan Desa Kedung Waringin dan
Utara	:	Berbatasan dengan Desa Bojong Baru

Adapun jarak antara kantor pemerintahan desa Bojong Gede dengan kantor kecamatan bojonggede dan pusat pemerintahan kabupaten, provinsi dan ibu kota negara adalah sebagai berikut ;

Kantor Kecamatan Bojong Gede	0.9/km
Kantor Kabupaten Bogor	4.7/km
Provinsi Jawa Barat	260/km
Ibu Kota Negara	160/km

Tabel 4. 2 Sumber : Pemerintahan Desa Bojong Gede, Tahun 2022

4.2.2 Sejarah Desa Bojong Gede

4.2.3 Legenda Desa (Sasakala)

Nama Bojong Gede berasal dari asal muasal sebuah batu besar yang menonjol atau mencorok kedalam dilubang bantaran kali ciliwung yang saat ini berada diwilayah Bojong Gede dalam dusun 4, terdiri dari 3 situs sejarah peninggalan sejarah Islam diantaranya Ratu Anti nama sebenarnya Ratu Maemunah seorang prajurit Banten yang berjuang melawan Tentara Padjajaran Digatedung jiwa.

Setelah perang selesai suaminya (Raden Pakpak) menyebarkan agama Islam di Priangan sedangkan Ratu Anti sendiri menetap di Bojong Gede sampai meninggal. Ratu Anti salah seorang yang menyebarkan agama Islam di Bojong

Gede di Alas Tua Dusun I, RH Panji Natakusuma di Kp. Masjid Dusun I dan RD Syafei di kp. Sawah Dusun II dan adanya situs sumur bandung dan batu tugu pahlawan jaman kemerdekaan di Dusun III.

4.2.4 Terbentuknya Desa Bojong Gede

Desa Bojong Gede merupakan salah satu desa tertua di wilayah Kecamatan Bojong Gede dimana pada tahun 1550-M Desa Bojong Gede sudah bernama Bojong Gede secara administrative Desa Bojong Gede sudah berdiri sejak tahun 1945 sebagai salah satu desa di Kecamatan Depok Daerah tingkat II Bogor namun, Sampai dengan tahun 1981 Bojong Gede hanya merupakan nama salah satu desa di Kecamatan Depok, baru pada tahun 1982, Depok menjadi Kota Administratif, dan Bojong Gede yang pada saat itu merupakan desa yang lebih menonjol dibandingkan dengan desa-desa lainnya ditetapkan menjadi Kecamatan Bojong Gede atau cikal bakal Kecamatan Bojong Gede, selanjutnya bersamaan dengan 2 Kecamatan lainnya di Kabupaten Bogor yaitu Kecamatan Caringin dan Kecamatan Nanggung, Bojong Gede resmi menjadi Kecamatan dengan Camat pertamanya Sudaryo.

Tabel 4.3 Peta Tapal Batas Desa Bojong Gede

Perdes Peta Desa	:	Perdes Nomor
Penetapan Batas Desa	:	Ada
Peta wilayah	:	Ada

Tabel 4.4 Luas Wilayah Menurut Penggunaannya Sumber Pemerintah Desa

KETERANGAN	LUAS	SATUAN
Luas Tanah Sawah	1.5	Ha
Luas Tanah Kering	21	Ha
Luas Tanah Basah	0.3	Ha

Luas Tanah Perkebunan	1.3	Ha
Luas Fasilitas Umum	3.2	Ha
Total	28	Ha

Tabel 4.5 Penggunaan Tanah Kering Sumber Pemerintah Desa

KETERANGAN	LUAS	SATUAN
Pemukiman	19	Ha
Pekarangan	2	Ha
Total	21	Ha

Tabel 4.6 Penggunaan Tanah Basah

KETERANGAN	LUAS	SATUAN
Tanah Rawa	0.3	Ha
Total	0.3	Ha

Tabel 4.7 Tanah Perkebunan

KETERANGAN	LUAS	SATUAN
Perkebunan Rakyat	0.6	Ha
Perkebunan Negara	0	Ha
Perkebunan Swasta	0	Ha
Perkebunan Perorangan	0.7	Ha
Total	1.3	Ha

Tabel 4.8 Penggunaan Tanah Fasilitas Umum Sumber Pemerintah Desa

KETERANGAN	LUAS	SATUAN
Kas Desa/Kekepalaan :		
A. Tanah Bengkok	0.2	Ha
B. Tanah Titi Sara	0	Ha
C. Kebun Desa	0	Ha
D. Sawah Desa	0	Ha
Lapangan Olahraga	0.1	Ha
Perkantoran Pemerintah	0	Ha
Sekretariat Publik/Taman Kota	0	Ha
Tempat Pemakam Desa/Umum	0.1	Ha
Tempat Pembuangan Sampah	0	Ha
Bangunan Sekolah/Perguruan Tinggi	0.3	Ha
Pertokoan	15	Ha
Fasilitas Pasar	0.05	Ha
Terminal	0.4	Ha

Jalan	6	Ha
Daerah Tangkapan Air	0	Ha
Usaha Perikanan	2	Ha
Sutet/Aliran Listrik Tegangan Tinggi	0.1	Ha

4.2.5 Aspek Pertanahan

Telah dilaksanakannya Catur Tertib Pertanahan, sehingga pemerintah desa mengetahui kondisi Status Tanah, Luas Tanah, Peruntukan Penggunaan Tanah, dan Tanah yang belum dikelola, diantaranya yaitu :

1. Tanah Aset Kekayaan Desa;
2. Status Kepemilikan Hak atas Tanah;
3. Kondisi Luas Tanah;
4. Pemanfaatan Peruntukan Tanah;
5. Luas Tanah Yang Belum Dikelola.

Untuk mengetahui kondisi perkembangan bidang pertanahan diwilayah desa, maka perlu diketahui dan tercatat dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa, sebagai berikut

Tabel 4.9 Status Kepemilikan Tanah Sumber Pemerintah Desa

STATUS TANAH	JUMLAH BIDANG	KET
Sertifikat Hak Milik (SHM)		Bidang
Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)		Bidang
Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU)		Bidang
Sertifikat Hak Pakai (SHP)		Bidang

Tabel 4.10 Kondisi Luas Tanah

STATUS TANAH	JUMLAH	KET
--------------	--------	-----

Jumlah Tanah Bersertifikat	7.450	Bidang
Jumlah Tanah Belum Bersertifikat	2.022	Bidang
Jumlah Tanah Milik Kas Desa/Aset Desa	271	Bidang
Total	9.743	Bidang

Tabel 4.11 Jumlah Wajib Pajak

STATUS PAJAK DALAM BUKU	JUMLAH WP	NILAI WP (RP)
Buku 1	5.518	237.277.289
Buku 2	4.057	719.091.136
Buku 3	126	-
Buku 4	34	93.931.039
Buku 5	8	71.899.914

Tabel 4.12 Aspek Demografi**Tabel 4.13 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Sumber Pemerintah Desa**

KELOMPOK USIA	JUMLAH
0-4	2418
5-9	3067
10-14	3219
15-19	3572
20-24	3634
25-29	3793
30-34	3532
35-39	3284
40-44	3331
45-49	3240
50-54	3356
55-59	2830
60-64	2067
65-69	1445
70-Keatas	969
Total	43758

Tabel 4.14 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Bojonggede Tahun 2021, Sumber Pemerintah Desa

URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
Jumlah Penduduk	43758	Jiwa
Jumlah Laki-Laki	22153	Jiwa
Jumlah Perempuan	21605	Jiwa
Kepala Keluarga	14767	KK

Tabel 4.15 Jumlah Penduduk Berdasarkan Wilayah (RW) di Desa Bojonggede, Sumber Pemerintah Desa

WILAYAH RW	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	JUMLAH LAKI2	JUMLAH PEREMPUAN
RW 01	429	1427	717	710
RW 02	710	2141	1086	1055
RW 03	146	447	222	225
RW 04	1060	3264	1595	1669
RW 05	687	2328	1230	1098
RW 06	196	714	358	356
RW 07	1028	3005	1550	1455
RW 08	1622	3177	1561	1616
RW 09	954	2782	1307	1475
RW 10	755	2620	1306	1314
RW 11	900	3130	1614	1516
RW 12	1021	2579	1393	1186
RW 13	921	2992	1494	1498
RW 14	1181	3558	1818	1740
RW 15	353	1064	529	535
RW 16	339	1154	574	580
RW 17	313	989	497	492
RW 18	61	215	105	110
RW 19	236	824	399	425
RW 20	192	522	290	232
RW 21	674	2118	1088	1030
RW 22	142	505	246	259
RW 23	197	362	186	176
RW 24	650	1841	988	853
Total	14767	43758	22153	21605

4.2.6 Aspek Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan cukup sulit karena jarak tempat pendidikan untuk tingkat SMA sangat jauh dengan pemukiman warga, sehingga kalau dilihat dari data statistik masih

rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan dalam kerangka usia dan partisipasi masyarakat Desa Bojonggede rata rata usia :

APK (Angka Partisipasi Kasar) SD merupakan angka hasil pembagian antara jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD atau sederajat dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah.

APM (Angka Partisipasi Murni) SD merupakan angka hasil pembagian antara jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD atau sederajat dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun.

APK (Angka Partisipasi Kasar) SLTP merupakan angka hasil pembagian antara jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SLTP atau sederajat dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah.

APM (Angka Partisipasi Murni) SLTP merupakan angka hasil pembagian antara jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SLTP atau sederajat dengan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun. APM SLTP mengalami peningkatan. Gejala ini menunjukkan bahwa pelajar lulusan SD banyak yang melanjutkan ke tingkat SLTP.

APK (Angka Partisipasi Kasar) SMA merupakan angka hasil pembagian antara jumlah siswa usia 16-18 tahun di jenjang SMA/MA/SMK/Paket C atau sederajat dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah.

APM (Angka Partisipasi Murni) SMA merupakan angka hasil pembagian antara jumlah siswa usia 16-18 tahun di jenjang SMA/MA/SMK/Paket C atau sederajat dengan jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun. APM SMA juga mengalami peningkatan. Gejala ini menunjukkan bahwa pelajar lulusan SLTP banyak yang melanjutkan ke tingkat SMA/MA/SMK/Paket C.

Tabel 4.16 Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikannya dapat di lihat pada Tabel Berikut, Sumber Pemerintah Desa

TINGKATAN PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
Buta Huruf	191	Jiwa
Belum Sekolah	3690	Jiwa
Tidak Tamat SD/Sederajat	1102	Jiwa
Tamat SD/Sederajat	4065	Jiwa
Tamat SLTP/Sederajat	7776	Jiwa
Tamat SMU/Sederajat	20716	Jiwa
Tamat Diploma (D1 S/D D3)	2641	Jiwa
Tamat Sarjana (S1 S/D S2)	3577	Jiwa
Total	43758	Jiwa

Tabel 4.17 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Khusus

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
Pendidikan TPA	310	Orang
Pendidikan Pondok Pesantren	246	Orang
Pendidikan Kursus Komputer	532	Orang
Pendidikan Kursus Bahasa	1221	Orang
Pendidikan Keterampilan	126	Orang
Total	2435	Orang

4.2.7 Kondisi Ekonomi Desa Bojonggede

Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Bojonggede Merupakan masyarakat Pedagang dan sebagai mayoritas penduduk , kondisi ini memungkinkan Desa Untuk mengembangkan segala pembinaan dan pemeberdayaan masyakat di bidang UMKM dan Pemeberian Modal Usaha kepada Keluarga UP2K dan UPK yang berkolaborasi dengan BUMDESA :

Tabel 4.18 Ekonomi Yang Di Bina Oleh Desa, Sumber Pemerintah Desa

JENIS PEMBINAAN	JUMLAH	KETERANGAN
UP2K	5	Kelompok
UPK	4	Kelompok
BUMDESA	1	Kelompok
KUBE	14	Kelompok
Pasar Desa	1	Unit
Total	25	

4.2.8 Kondisi Pertumbuhan Perekonomian

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan Ekonomi Desa Bojonggede cukup fluktuatif dengan mengalami kenaikan pada tahun 2020 ke tahun 2027.

Tabel 4.19 Potensi Hasil Pengrajin Dan Industri Kecil, Sumber Pemerintah Desa

POTENSI USAHA DAN KERAJINAN MASYAKAT	JML	KET
Konfeksi	17	Unit
Pengrajin Dodol	11	Unit
Bank Sampah	15	Unit
Pabrik Minuman	5	Unit
Pabrik Pupuk	1	Unit
Pabrik Kosmetik	1	Unit
Pabrik Kerupuk	2	Unit
Pabrik Roti	7	Unit
Pengrajin Kayu (Bambu, Kusen)	27	Unit
Pengrajin Tahu	24	Unit
Pengrajin Perak/Emas	2	Unit
Pengrajin Pot/Batu	8	Unit
Pengrajin Lukisan	3	Unit
Total	123	Unit

**Tabel 4.20 Berdasarkan Mata Pencaharian Di Desa Bojonggede Tahun 2021,
Sumber Pemerintah Desa**

MATA PENCAHARIAN	JUMLAH	KET
Petani	24	Jiwa
Nelayan	4	Jiwa
Buruh Tani/Buruh Nelayan	330	Jiwa
Buruh Pabrik	219	Jiwa
PNS	1251	Jiwa
Pegawai Swasta	4239	Jiwa
Wiraswasta/Pedagang	2522	Jiwa
TNI	116	Jiwa
POLRI	46	Jiwa
Dokter (Swasta/Honoror)	27	Jiwa
Bidan (Swasta/Honoror)	27	Jiwa
Perawat (Swasta/Honoror)	64	Jiwa
Lainnya	573	Jiwa
Jumlah Warga Penyandang Kebutuhan Khusus	180	Jiwa
Pengusaha Besar	48	Jiwa
Pengusaha Menengah	219	Jiwa
Pengusaha Kecil	638	Jiwa
Pengrajin	33	Jiwa
Buruh Industry	71	Jiwa
Buruh Bangunan	420	Jiwa
Buruh Pertambangan	34	Jiwa
Buruh Perkebunan	89	Jiwa
Anggota DPRD Kabupaten	1	Jiwa
Anggota DPR Provinsi	V	Jiwa
Anggota DPR RI	0	Jiwa
Total	11175	Jiwa

Tabel 4.21 Berdasarkan Tempat Dan Fasilitas Usaha Di Desa Bojonggede Tahun 2021, Sumber Pemerintah Desa

POTENSI USAHA MASYAKAT	JML	KET
Bengkel Sepeda	12	Unit
Bengkel Mobil Atau Motor	60	Unit
Toko Ikan Hias	31	Unit
Toko Konter/Telepon Seluler	40	Unit
Toko Buah	15	Unit
Toko Sembako	279	Unit
Toko Beras	27	Unit
Toko Pakaian	33	Unit
Toko Bahan Bangunan	9	Unit
Toko Furniture	3	Unit
Toko Obat (Apotik)	15	Unit
Toko Elektronik	8	Unit
Toko Alat Listrik	14	Unit
Toko Mainan Anak	12	Unit
Toko Makanan Hewan	12	Unit
Toko Perabotan Rumah Tangga (Kelontong)	12	Unit
Rumah Makan 1 S/D 5 Kursi (Kuliner, Minuman Dll)	93	Unit
Rumah Makan 1 S/D < 10 Kursi	12	Unit
Toko Kue Kering	13	Unit
Toko Mini Market (Indo, Alfa , Ceria Dll)	16	Unit
Toko Frozen	17	Unit
Toko Sayur Mayur	46	Unit
Showrom Motor	5	Unit
Toko Sepatu/Sandal	9	Unit
Agen Gas Elpiji	36	Unit
Agen Minyak Tanah	1	Unit
Spbu (Bensin)	1	Unit
Spbe (Gas)	1	Unit
Pom Bensin Mini	26	Unit
Bensin Eceran	40	Unit
Steam Motor/Mobil	16	Unit
Toko Emas	1	Unit
Pom Bensin	1	Unit
Studio Photo	4	Unit
Studio Music	0	Unit
Rental Komputer/Warnet Internet	15	Unit
Salon/Rias Kecantikan/Barber Shop/Cukur	43	Unit
Tukang Tenda/Alat Pesta	12	Unit

Refiel Farpum	10	Unit
Tukang Tanaman Hias	33	Unit
Bank	5	Unit
Pegadaian/Koperasi	7	Unit
Total	1045	Unit

Tabel 4.22 Potensi Hasil Peternakan

POTENSI PERIKANAN/PETERNAKAN	JUMLAH	KET
Sapi	10	Ekor
Kerbau	10	Ekor
Kambing	65	Ekor
Ayam	554	Ekor
Perikanan	25630	KG
Keramba	100	Unti

4.2.9 Kondisi Infrastruktur Desa

Kondisi Infrastruktur Desa Bojonggede Baik infrastruktur Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat secara umum sudah sangat Baik walaupun, masih ada beberapa yang belum tercapai dalam pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian penyeimbangan Rencana Pembangunan Desa tahun 2021-2027 ini, menyelaraskan program pemerintah daerah, pusat dan SDGS Desa harus benar-benar teliti dan terarah, dengan melihat dan menggali potensi pendukung dari kondisi infrastruktur saat ini diantaranya :

Infrastruktur Pemerintahan Desa

Tabel 4.23 Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Desa Bojonggede, Sumber Pemerintah Desa

ASET TETAP	LUAS/JUMLAH	NOMOR SURAT	STATUS/KEPEMILIKAN
Kantor Desa Bojonggede	545 M2	-	Aset Desa
Tanah Lapangan Siaga	5.400 M2	-	Aset Desa
Tanah Pasar Desa	1.500 M2	-	Aset Desa
Mobil Siaga Desa	3 Unit	-	Aset Desa

Mobil Aspirasi Desa	1 Unit	-	Aset Desa
---------------------	--------	---	-----------

Tabel 4.24 Infrastruktur Pembangunan/Bidang Kesehatan

FASILITAS KESEHATAN	JML	KET
Puskesmas / Pustu	0	Unit
BKIA Rumah Bersalin	10	Unit
Poliklinik	7	Unit
Posyandu	26	Unit
Apotik / Toko obat	0	Unit
Rumah Sakit	0	Unit
Balai Pengobatan	5	Unit
Total	48	Unit

Tabel 4.25 Bidang Pendidikan

TINGKATAN SEKOLAH	JML	KET
SEKOLAH NEGERI		
TK	0	Unit
PAUD	0	Unit
SD/MI	6	Unit
SMP/MTSN	0	Unit
SMK SEDERJAT	0	Unit
SEKOLAH SWASTA		
TK	14	Unit
PAUD	7	Unit
SD/MI	7	Unit
SMP/MTSN	5	Unit
SMK SEDERJAT	2	Unit
PENDIDIKAN NON FORMAL		
PONDOK PESANTREN	4	Unit
MAJELIS TALIM	32	Unit
BIMBEL, LEMBAGA KURSUS	7	Unit
Total	84	Unit

Bidang Sarana Prasarana

Tabel 4.26 Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Sekertariat, Sumber Pemerintah Desa

SARANA	LUAS	KET
Jalan Kabupaten, Jalan Provinsi, Pusat		
-Jalan Hotmix	3	KM
-Jalan Beton	5	KM
-Jalan Tanah	0	KM
JALAN DESA		
-Jalan Hotmix	0	KM
-Jalan Beton	29	KM
-Jalan Tanah	3	KM
JALAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN		
-Jalan Hotmix	4	KM
-Jalan Beton	65	KM
-Jalan Tanah	16	KM
-Jembatan Pusat	0	Unit
-Jembatan Provinsi	3	Unit
-Jembatan Kabupaten	6	Unit
-Jembatan Desa	2	Unit
-Pemakaman/Petilasan Milik Desa	5	BH
-Gapura/Batas Desa		Unit

Tabel 4.27 Sarana Kehutanan Dan Lingkungan Hidup

NAMA SARANA TAMAN	JUMLAH	KETERANGAN
Terbuka Hijau	12	Unit
Taman Bermain Anak	2	Unit
Total	14	Unit

Tabel 4.28 Sarana Pemukiman Milik Desa

NAMA SARANA MILIK DESA	JUMLAH	KET
Sumur Resapan Milik Desa	7	Unit
Sumber Air Bersih Milik Desa	4	Unit
Sanitasi Pemukiman	19	Unit
Jamban Umum/MCK Umum	12	Unit
Tempat Pengelolaan Sampah Desa	1	Unit
Bank Sampah	17	Unit
Total	60	Unit

Tabel 4.29 Sarana Perhubungan Komunikasi Dan Informatika

NAMA SARANA	JUMLAH	KET
Terminal Kelas D	1	Unit
Stasiun KA	1	Unit
Tower BTS	9	Unit
Bilboard	9	Unit
Total	20	Unit

Tabel 4.30 Sarana Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sumber Pemerintah Desa

NAMA SARANA	JUMLAH	KET
Pos Keamanan Desa	1	Unit
Pos Keamanan Lingkunga	67	Unit
Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	1	Unit
Pos Polisi/ Tiga Pilar	1	Unit
Total	70	Unit

Tabel 4.31 Sarana/Ibadah

SARANA IBADAH	JUMLAH	KETERANGAN
Masjid	18	Unit
Musholah/ langgar	89	Unit
Gereja	-	Unit
Wihara	-	Unit
Pura	-	Unit
Kelenteng	-	Unit
Total	107	Unit

Tabel 4.32 Sarana Kebudayaan

SARANA KEBUDAYAAN	JUMLAH	KETERANGAN
Balai Pertemuan	3	Unit
Sanggar Seni	1	Unit
Total	4	Unit

Tabel 4.33 Sarana Kepemudaan dan Olahraga

NAMA SARANA	KONDISI		JUMLAH
	BAIK	RUSAK	
Sepak Bola		1	1
Futsal	3	1	4
Bulu tangkis	12	9	21
Volly	2	1	3
Tennis Meja	25	3	28
Basket	3	1	4
Taman Bermain anak	1	6	7
Total			68

Tabel 4.34 Sarana Kelembagaan Masyarakat

SARANA SEKERTARIAT DESA	JUMLAH	KET
Sekretariat PKK	1	Unit
Sekretariat BPD	1	Unit
Sekretariat Desa Siaga aktif	1	Unit
Sekretariat BKMT	1	Unit
Sekretariat Destana	1	Unit
Sekretariat Karang taruna	1	Unit
Sekretariat BUMdes	1	Unit
Sekretariat UMKM	1	Unit
Sekretariat LPM	1	Unit
Sekretariat Pokja Posyandu	1	Unit
Sekretariat Foum Bank Sampah	1	Unit
Total	11	Unit

4.3 Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan mendeskripsikan data hasil penelitian yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara serta dokumentasi, data bersumber dari peneliti yang dilakukan dilapangan terhadap informan.

Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui UMKM peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang sudah ditentukan dan memiliki kapasitas baik dari unsur pemerintah desa maupun tokoh masyarakat dan kelompok UMKM serta beberapa perwakilan masyarakat desa Bojong Gede.

Informan pertama yang diwawancarai adalah Bapak H, Caal selaku Sekretaris desa Bojong Gede mewakili kepala desa, dimana peneliti ingin menanyakan sejauh mana pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Bojong Gede secara umum, beliau mengatakan;

“Bapak H, Caal Menjawab, Intinya kami atas nama pemerintah bojonggede di bawa kepemimpinan Bapak Kepala Desa Dede Malvina, sejauh ini sudah melakukan pembangunan secara fisik maupun non fisik, secara fisik infrastruktur pembangunan jalan, kalau yang non fisik seperti peningkatan Ekonomi kemasyarakatan dan pembinaan-pembinaan lainnya, di samping pembinaan Ekonomi, pemerintah desa juga melakukan pembinaan kepada masyarakat agar bersih dari narkoba atau (BERSINAR) secara umum berdasarkan Visi dan Misi bapak kepala desa Dede Malvina, terkait pembangunan-pembangunan di desa sudah berjalan dengan lancar berkat kegigihan kepala desa yang didukung oleh seluruh perangkat desa dan seluruh elemen masyarakat bersatu padu untuk membangun desa bojonggede yang Maju Mandiri dan Berahklak Mulia”.

Selanjutnya peneliti menanyakan kendala-kendala yang ditemui dan dihadapi pemerintah desa secara umum dan Bapak Sekretaris H, Caal menjawab ;

“Secara garis besar sebetulnya kita tidak ada kendala tetapi dalam proses pelaksanaannya itu memang butuh waktu karena anggaran yang kita

dapatkan baik dari pemerintah pusat pemerintah provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dan juga Pendapatan asli Desa tentu tidak dapat kita lakukan secara pembangunan fisik maupun non fisik, itu dalam kurun waktu 1 tahun karena pembangunan di Desa Bojong Gede itu yang terdiri dari 118 RT dan 24 RW kita harus membagi waktu, mungkin di situ yang agak sedikit kita butuh waktu dalam melakukan program rencana kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKP Desa yang ada di Desa Bojong Gede, tentu dalam proses pembagian wilayah mana yang akan kita bangun itu memang untuk argumentasi dan untuk menentukan skala prioritas memang kita butuh beberapa kali rapat jadi dimulai dari rapat tingkat RT tingkat RW dan tingkat Dusun tingkat Dusun itu dinamakan MUSDUS baru kita meningkat ke desa untuk menentukan yang mana menjadi skala prioritas.

Jadi intinya secara garis besar nyaris tidak menemui kendala kecuali anggaran yang memang tidak di cover oleh kita salah satu contoh itu kita ada pembangunan Tura Sungai yang memang itu kewenangan dari PSDA Nah itulah agak sedikit kendala, karena itu tidak boleh dianggarkan oleh Pemerintah Desa dari anggaran manapun baik itu Anggaran DD ADD BAPRD kita tidak boleh angkarkan karena itu memang kewenangannya PSDA”.

Peneliti juga menanyakan terkait peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui UMKM dan Bapak H, Caal sekertaris desa menjawab ;

“Di desa bojonggede itu kita ada beberapa usaha UMKM yang di lakukan oleh UMKM yaitu sala satunya adalah pembuatan DODOL yang sudah menjadi ciri kahas desa bojonggede dan walaupun pemerintahannya bogor jawa barat tetapi secara kultural budaya itu lebih kepada DKI jakarta atau Budaya Betawi jadi Dodol itu sebetulnya kahasnya Betawi, memang banyak sekali pengiat atau usaha-usah rumahan yang memproduksi Dodol dan kami dari pemerintah desa bojonggede juga memfasilitasi dan kalau dulu hanya ada dodol orisinal sekarang itu sudah ada Bidol di samping itu juga peran serta dari tokoh masyarakat sangat di butuhkan dan saat ini semua sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dalam meningkatkan kesejahteraan Ekonomi maupun Pembangunan lainnya”.

Untuk mengetahui tentang fokus masalah yang ingin digali, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Anti Herwanti selaku Wakil Ketua UMKM Bojong Gede yang mewakili seluruh pelaku UMKM yang dikelolah oleh pemerintah desa, peneliti menanyakan apakah, pemerintah desa selalu melibatkan

masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan ekonomi melalui UMKM, jawaban dari beliau adalah ;

“Ibu Anti Herwanti menjawab, pemerintah desa bojonggede selalu melibatkan masyarakat dalam hal kegiatan apapun, baik kegiatan pembangunan Ekonomi, maupun kegiatan-kegiatan khususnya dari pelaku UMKM itu selalu di libatkan selalu di undang dalam rapat-rapat ataupun dari undangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, bahkan bukan hanya sekedar ke arah Ekonomi, pembangunan pun sama kami selalu di libatkan sebagai masyarakat dan itu sangat berdampak juga pada UMKM dan UMKM pun ikut di libatkan”.

Selanjutnya peneliti menanyakan, bagaimana peran pemerintah desa dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi didesa ;

“Menjelaskan bahwa, desa selalu melibatkan masyarakat dalam kegiatan apapun untuk mensejahterakan masyarakatnya dan pemerintah desa sudah memberikann bantuan berupa gedung UMKM yang letaknya di area desa bojonggede yang menghadap ke pasar deka kantor desa dan kami juga diberikan fasilitas seperti Tenda untuk Basar dan juga gerobak untuk di pergunakan oleh pelaku UMKM jadi itu sangat bermanfaat bagi kami pelaku UMKM dan sangat membantu sekali bagi kami terutama pelaku UMKM dan setiap ada kegitan besar kami selalu dipanggil dan dilibatkan untuk mengadakan Basar dimana kegitan yang dibuat oleh pemerintah desa”.

Pada saat ditanya mengenai kendala-kendala yang ditemui dan dihadapi pemerintah desa dalam pembangunan ekonomi UMKM didesa, Ibu Anti Herwanti mengatakan bahwa ;

“Kalau dari kendala terhadap pemerintah desa itu saya pikir kembali kepada masyarakatnya, karena sejauh ini pemerintah desa sudah memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya agar mau membuka usaha contohnya masyarkat membutuhkan surat-surat SKHU dan lain-lain itu selalu pemerintah bantu dengan secara gratis, tetapi yang menjadi kendala adalah dari masyarakatnya sendiri yang sebagai pelaku UMKM itu kurang sadar bahwa desa selalu merangkul mereka, tetapi respon dari masyarakat yang masih kurang padahal desa sudah memberikan fasilitas bahkan desa juga mengijinkan agar masyarakat desa bisa melakukan basar di depan kantor desa setiap hari sabtu dan minggu karena desa sudah

menyediakan gedung UMKM dan fasilitas berupa tenda dan gerobak dan lain-lain untuk di pergunakan oleh masyakarkat yang berniat melakukan basar, dan menurut wakil ketua UMKM pemerintah desa sudah memberikan yang terbaik baiggi masyarakatnya”.

Informan lainnya yaitu dari Bapak Ikhwan selaku Kepala Dusun Satu, peneliti menanyakan tentang peran dari tokoh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui UMKM, menurut beliau ;

“Bapak Ikhwan mengatakan, kalau untuk peran tokoh masyarakat yang pasti adalah sangat mendukung karena apa, dengan adanya UMKM minimal kita bisa meminimalisir angkat penganguran, apalagi pada tahun sebelum-sebelumnya pada saat ada wabah COVID-19 nah dengan adanya peran serta dari UMKM itu sangat membantu dan setiap ada iven kegiatan itu kita selalu melibatkan UMKM agar usaha atau dagangan masyarakat itu bisa berkembang dan dikenal oleh banyak orang”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa informan, baik dari unsur pemerintahan desa dan tokoh masyarakat serta wakil ketua UMKM bojonggede, kemudian dari hasil pengamatan dilapangan tentang peran pemerintah desa dan juga tokoh masyarakat dalam kondisi ekonomi masyarakat dan aktifitas UMKM dipasar desa bojonggede, ada korelasinya.

Semua apa yang dipaparkan dan dijawab oleh Informan relevan dengan konteks atau tema penelitian, dimana dari temuan penelitian dapat penulis simpulkan, sebagai berikut ;

1. Menurut Informan Bapak H, Caal selaku Sekretaris Desa mewakili Kepala Desa, pembangunan di desa Bojong Gede, baik itu pembangunan fisik maupun non fisik, contohnya fisik seperti pembangunan infrastruktur jalan dan pembangunan ekonomi non fisik baik dari UMKM yang dibuat desa, sudah berjalan sangat baik dan sejauh ini untuk kendala di pemerintah desa nyaris tidak menemukan kendala, tetapi untuk menjawab semua aspirasi dari seluruh masyarakat kami juga pasti membutuhkan waktu agar aspirasi yang sudah tertampung ini bisa kami jawab sesuai dengan anggaran di desa.
2. Menurut Bapak Ikhwan selaku Kepala Dusun satu, pembangunan di desa Bojong Gede secara umum berjalan lancar dan merata sesuai dengan

peraturan pemerintah yang diatur dalam APBDesa dan memang sesuai dengan pengajuan dari masyarakat kepada RT-RW kemudian dinaikan kepada pemerintah desa untuk dimusyawarahkan agar bisa dijawab sesuai dengan skala prioritas.

3. Menurut Informan Ibu Anti Herwanti selaku Wakil Ketua Kelompok UMKM, setiap ada kegiatan yang dibuat pemerintah desa baik itu kegiatan Sosial, Ekonomi maupun kegiatan-kegiatan budaya, itu masyarakat selalu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan tersebut apalagi kami dibagian UMKM pasti selalu dilibatkan, itu adalah salah satu cara untuk pemerintah desa mengangkat UMKM masyarakat desa agar bisa lebih dikenal produk-produk yang dimiliki pelaku UMKM.

4.4 Pembahasan Temuan Penelitian

Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui (UMKM) di Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui UMKM di desa Bojong Gede kecamatan bojong gede kabupaten bogor provinsi jawa barat, peneliti melihat bahwa pemerintah desa bojong gede belum sepenuhnya mengoptimalkan Tupoksinya dalam mengangkat kuliner-kuliner UMKM, dan pemerintah desa juga sudah memberikam fasilitas gedung, tenda dan gerobak untuk dipergunakan masyarakat bojong gede, tetapi meskipun pemerintah desa bojong gede mengatakan sudah maksimal dalam pembangunan kesejahteraan ekonomi dan pembangunan secara umum dan pemerintah desa juga sudah melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan basar di desa, namun berdasarkan pengamatan peneliti lapangan memang sudah ada kemajuan dan masyarakat sering diundang dalam kegiatan acara-acara yang dilakukan

pemerintah desa, meskipun dalam hal ini peran kepala desa sering mangkir atau tidak aktif dikantor desa, sehingga penulis menilai bawasannya kepala desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala pemerintahan masih kurang dan menurut penulis masih banyak hal yang harus ditingkatkan oleh pemerintah desa dalam hal apapun, terutama bagi pelayanan publik dalam mendorong ekonomi masyarakat desa.

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 8 Menyatakan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Selanjutnya, di dalam pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- 1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- 2) Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- 3) Pembangunan desa sebagai mana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengaruh utama perdamaian dan keadilan sosial.

Berdasarkan Pasal 78 UU No.6 Tahun 2014 Tentang desa tersebut dan jika dikorelasikan dengan hasil penelitian serta hasil pengamatan dilapangan, menunjukan bahwa pembangunan ekonomi di desa Bojong Gede sudah sesuai dengan UU meskipun dalam pelaksanaannya belum optimal.

Faktor penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui UMKM di desa Bojong Gede kecamatan bojong gede kabupaten bogor provinsi jawa barat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan dilapangan ada beberapa faktor penghambat dalam pembangunan kesejahteraan ekonomi di desa Bojong gede.

Faktor penghambat tersebut bisa bersumber dari internal pemerintahan desa seperti kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah desa sebagai penggerak atau motor terhadap pembangunan atau juga terbatasnya anggaran desa, serta pengaruh faktor eksternal seperti kurangnya partisipasi dan dukungan dari masyarakat.

Sumber daya manusia adalah seluruh kemampuan atau potensi seseorang atau penduduk yang berada didalam suatu wilayah tertentu beserta karakteristik atau ciri demografi, sosial maupun ekonominya yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan, Jadi membahas sumber daya manusia berarti membahas penduduk dengan segala potensi atau kemampuannya. Potensi manusia menyangkut dua aspek yaitu aspek kuantitas dan kualitas.

(Hasibuan ; 2010) Karakteristik demografi merupakan aspek kuantitas sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk menggambarkan jumlah dan pertumbuhan penduduk, penyebaran penduduk dan komposisi penduduk.

Dalam hal ini karakteristik sosial dan ekonomi berhubungan dengan kualitas (Mutu SDM), keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang ada baik secara fisik maupun mental, dengan demikian SDM atau penduduk menjadi aset tenaga kerja yang efektif untuk menciptakan kesejahteraan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Mengacu pada hasil-hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan akhir sebagai berikut :

1. Bahwa peran pemerintah desa dalam urusan pembangunan kesejahteraan ekonomi serta pembinaan UMKM di desa bojong gede saat ini sudah cukup baik, walaupun belum mencapai hasil yang optimal.
2. Faktor pendukung dalam peran pemerintah desa Bojong Gede yang telah mendukung masyarakat dengan memberikan bantuan permodalan, menyiapkan sarana prasarana untuk digunakan dalam mengembangkan UMKM desa, namun yang menjadi faktor hambatan adalah kurangnya pemahaman dalam pengelolaan bantuan tersebut menjadi hambatan bagi kemajuan UMKM tersebut dan berdampak pada ketidaak stabilnya ekonomi desa.
3. Pemerintah desa berupaya memberikan dampak positif bagi kemajuan desanya dari berbagai aspek, seperti menciptakan peluang usaha yang kondusif bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan produknya, agar bisa lebih terjangkau dipasaran maupun dikalangan masyarakat, UMKM juga mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi lokal

kususnya perekonomian desa, pemerintah hadir untuk bagaimana meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada di desa dengan memberikan pelayanan yang baik dan bertanggungjawab terhadap semua keputusan yang telah dibuat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk memberikan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan peran pemerintah desa dalam pembangunan kesejahteraan ekonomi serta pembinaan UMKM maka perlunya ;
 - a. peningkatan kualitas pelayanan publik dari aparaturnya pemerintah desa yang lebih pro kepada masyarakat.
 - b. pemerintah desa perlu melakukan pengawasan dalam pengembangan UMKM masyarakat desa.
 - c. perlunya pemerintah desa memberikan pelatihan-pelatihan kepada pelaku UMKM dengan melibatkan pihak eksternal.
2. Walaupun pemerintah desa Bojong Gede telah memberikan bantuan permodalan dan menyiapkan sarana prasarana kepada masyarakat tetapi sebagai saran ;
 - a. Pemerintah perlu mengawasi setiap bantuan yang diberikan kepada masyarakat guna menghindari penyalagunaan bantuan tersebut.

- b. Pemerintah desa perlu melihat lebih jeli dalam memberikan bantuan permodalan kepada siapa akan diberikan dan apakah akan dimanfaatkan untuk kepentingan kemajuan ekonomi atau tidak, karena terkadang masyarakat yang telah menerima bantuan tersebut kadang dipake untuk tujuan yang lain dan bukan untuk kepentingan usah UMKM-nya.
 - c. Pemerintah desa dan masyarakat harus bersama-sama saling mendukung dalam kepentingan kemajuan desanya.
- 3. pemerintah desa Bojong Gede perlu membenahi pelayanan publik yang baik dan responsif terhadap setiap keluhan masyarakat ;
 - a. seperti menerima kritikan dan masukan dari masyarakat yang ingin agar desanya semakin maju.
 - b. pemerintah desa juga harus siap memberikan kontribusi penuh kepada ekonomi masyarakat desa agar semakin baik dan maju.
 - c. pengelolaan anggaran desa harus lebih pro kepada pelaku UMKM desa.
- 4. Pemerintah desa harus mampu mendorong kemajuan UMKM desa agar bisa berdampak positif bagi perekonomian masyarakat desa ;
 - a. seperti memberikan bantuan permodalan guna peningkatan produktifitas UMKM.
 - b. juga memberikan pelatihan pengolahan manajemen keuangan yang baik dan benar, hal ini penting karena faktor utama UMKM desa

tidak berkembang karena minimnya manajemen keuangan yang tidak bisa tertata baik akan berdampak bagi kegagalan pertumbuhan UMKM.

- c. untuk itu perlu juga ada pelatihan-pelatihan khusus bagi kelompok UMKM untuk bagaimana memasarkan produk-produk yang dipasarkan dan juga pelatihan cara pengolahan produknya, dengan demikian maka kelompok UMKM akan mendapatkan wawasan tambahan untuk kedepannya bagaimana mengembangkan usaha UMKM-nya, agar bisa lebih terjangkau.

5. Pemerintah desa juga perlu melihat dan menjaga fasilitas-fasilitas yang telah dibangun ;

- a. seperti sarana kepemudaan dan olahraga yang diantaranya ada beberapa yang sudah rusak, hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah desa sebagai fasilitator dalam menjaga semua pembangunan diwilayah desanya.
- b. tetapi perlu juga membuat himbauan kepada semua masyarakat agar bisa menjaga fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL-JURNAL WEB

(Abu Ahmadi :1982) *Tentang Peran Merupakan Aspek Dinamis Kedudukan Status*

Abdi, Y., & Batubara, B. A. (2022). *Sosialisasi Digitalisasi Dan Modernisasi Umkm Kepada Masyarakat Desa Mancang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat*. Altafani, 2(1), 211-215.

Agustina, R., Dwanoko, Y. S., & Suprianto, D. (2021). *Pelatihan Desain Logo Dan Kemasan Produk UMKM di Wilayah Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang*. Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks" SOLIDITAS"(J-SOLID), 4(1), 69-76.

Arsjad, M. F. (2018). *Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo*. Gorontalo Journal of Public Administration Studies, 1(1), 16-32.

Dalam Model Ini Ada Tiga (3) Komponen Analisis Yaitu Reduksi Data, Penyajian Data Dan Penarikan Kesimpulan.

(Harmaizar Z) 21 Maret 2022) *Definisi Usaha Pengertian-Umkm-Menurut-Ahli Secara Garis Besar.*

<https://Putusuardiana.Blogspot.Com/2014/12/> *Tentang Hipotesis.*

Idayu, R., Husni, M., & Suhandi, S. (2021). *Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten*. Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo, 7(1), 73-85.

Jurnal ; Kristiyanti (2012) *juga menjabarkan langkah-langkah strategis agar UMKM mampu bersaing di masa mendatang.*

jurnal Oleh (Andi Pitono dan Kartiwi) politikologi Vol.3/No.1/Oktober 2016-27–37, *Institut Pemerintahan Dalam Negeri-Tentang Penguatan Pemerintahan Desa.*

(Permendagri Nomor 84 Tahun 2015) *Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa*

(Soekanto 2002;243) *Triangulasi Teknik Pengumpulan Data*

(Sumber, UU No 6 Tahun 2014), *Tentang Desa, Pasal 78 Ayat 1-2 dan 3 d/s)*

(Suradinata 1997: 11) *Tentang Pemimpin Dan Kepemimpinan*

UNDANG-UNDANG

(Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008), *Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*

SUMBER JURNAL KAJIAN ILMIAH

1. Jurnal ; Hanna Fitriyati, *dengan judul “Strategi Pemberdayaan UMKM di Indonesia*

2. Jurnal ; Sudaryanto, R, & Wijayanti (2013). *Strategi pemberdayaan UMKM menghadapi pasar bebas Asean. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. Badan Kebijakan Fiskal. Kementerian Keuangan, Jakarta.*

Kajian Ilmu Pemerintahan, 2 (2), 124-139.

Kusumastuti (2021). *Peran Koperasi Dalam Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Pada UMKM di Indonesia.* Unisri Press.

Menurut Kartono (2011 :69) *Tentang Peranan*

Menurut Max Weber (12 November 2020) *Tentang Teori Birokrasi dan Teori Organisasi*

Menurut Miftah Thoha (2012 : 10) *Tentang Peran*

Menurut Napitupulu (2012: 9) *Tentang Pemerintah*

Menurut Setiono (2011:494) *definisi-desa-menurut-berbagai-ahli* (diunduh tanggal 18 Maret 2020)

Menurut Wijaja (2003:27) *Kepala Desa Yaitu Penguasa Tertinggi di Desa Dan Sebagai Pemimpin Formal Maupun Informal*

Octavia, A. (2020). *Studi Tentang Kelompok Belajar Usaha Amplang Pada Rumah Produksi Usaha Anda Jaya Samarinda. Learning Society: Jurnal CSR, Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 29-43.

Pelu Madubun, J & Wance, M. (2023). *Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintahan Negara Bagian Hila Kabupaten Maluku Tengah.*

Peran penting umkm penggerak sektor ekonomi indonesia di tingkat menengah-ke-bawah

Sugianti, S., Ferawati, R., & Hafiz, A. P. (2019). *Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Mensejahterakan Karyawan di Pusat Oleh-Oleh Mak Denok Desa Serdang Jaya Kabupaten Tanjung Jabung Barat* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin).

Sugianto, A. (2022). *Kualitas Pelayanan* (Disertasi Doktor, Universitas Islam Riau).

Sumber Lincio Dan Guba-Dalam Sugiyono 2012: 224).

Teknik Kerangka Pemikiran/Teknik Operasional Konsep Dan Teknik Pengumpulan Data

Teori Soekanto (2001 : 242) Tentang *Pengertian Operasional Konsep*

Umkh desa untuk ekonomi nasional, (7 Juni 2020).

DOKUMEN UNDANG-UNDANG

Undang-undang (UU) Entitas Nomor 11 Tahun 2020, Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa Pasal 1 ayat (1)

JURNAL WEB

Wardiningsih, R. (2022). *Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Pujut*. Yasin, 2(3), 383-392.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Observasi

Dalam pengamatan (Observasi) yang dilakukan adalah peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui umkm di desa bojong gede kecamatan bojong gede kabupaten bogor provinsi jawa barat.

A. Tujuan

Untuk memperoleh data secara mendalam mengenai peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui UMKM di desa bojonggede kecamatan bojong gede kabupaten bogor provinsi jawa barat dan bagaimana tupoksi pemerintah desa dalam memimpin pembangunan kesejahteraan ekonomi di desa bojong gede.

B. Aspek yang Diamati

No	Aspek Yang Diamati	Keterangan
1.	Lokasi Penelitian	Menyesuaikan Kondisi Tempat Penelitian Mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Melalui UMKM di Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
2.	Waktu Observasi	Dimulai Pada Bulan Februari Hingga Juni 2023
3.	Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Melalui UMKM	Sudah Cukup Baik Namun Beberapa Hal Yang Harus Lebih Ditingkatkan Lagi Seperti Peningkatan Pelayanan Publik Dan Mendorong UMKM Desa Agar Lebih Maju.
4.	Kondisi Sosial Dan Ekonomi Maupun Aktifitas Aparatur Desa	Kondisi Sosial Dan Ekonomi Cukup Baik, Namun Aktifitas Aparatur Desa Masih Kurang Karena Kebanyakan Perangkat Desa Tidak Aktif Di Kantor Desa Dan Susah Untuk Ditemui Oleh Peneliti Dalam Proses Wawancara.
5.	Dampak	Untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Melalui UMKM Desa.

C. Catatan Lapangan Hasil Observasi

No	Aspek Yang Diteliti	Keterangan	Catatan Penelitian
1.	Lokasi Penelitian	Didesa Bojong Gede Kecamatan Ojong Gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat	Lokasi Sangat Strategis dan Muda Dijangkau Oleh Peneliti
2.	Waktu Observasi	Waktu Observasi Dimulai Pada Bulan Februari Hingga Juni 2023	Kondisional
3.	Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui UMKM	Sudah Sesuai Tupoksi Pemerintah Desa	Pemerintah Desa Bersama RT-RW Dan Kepala Dusun Serta Masyarakat Selalu Membangun Komunikasi Yang Intens Untuk Bersama-Sama Membangun Desa
4.	Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui UMKM Didesa Bojong Gede	Sudah Cukup Baik	Pembangunan Secara Umum Didesa Sudah Cukup Baik Namu Yang Menjadi Kendala Adalah Kurangnya Partisipasi Dari Masyarakat Mejadi Tantangan Tersendiri Bagi Pemerintah Desa
5.	Kondisi Sosial Dan Pembangunan Didesa Bojong Gede	Sudah Cukup Baik Karena Pemerintah Desa Sangat Optimal Dalam Mendorong UMKM Desa Diberbagai Kegiatan	Pemerintah Desa Sangat Bersikukuh Dalam Mendorong Masyarakat Agar Mampu Mengembangkan Ekonominya Melalui Pembentukan Kelompok UMKM Yang Dibentuk Oleh Pemerintah Desa Bojong Gede
6.	Dampak	Untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Melalui UMKM	Sudah Ada Peningkatan dan Dirasakan Oleh Masyarakat Dalam Peningkatan Pembangunan Ekonomi Maupun Insfrastruktur di desa

PEDOMAN WAWANCARA

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan perhatian dan izin kepada saya dalam melakukan penelitian dikarenakan Peneliti menentukan Lokasi Usulan Penelitian di Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, ini merupakan lokus pada usulan penelitian saya.

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data secara objektif dan akurat dengan proses wawancara dari beberapa Informan. Dengan memajukan beberapa pertanyaan kepada bapak/ibu selaku perangkat desa dan beberapa perwakilan masyarakat sebagai pelaku UMKM, data yang diterima dari informan akan digunakan peneliti dalam catatan ilmiah dan tidak dipergunakan dalam hal lain selain catatan ilmiah.

a. Informan Penelitian.

Informan dalam penelitian ini adalah perangkat desa dan masyarakat sebagai pelaku UMKM, sedangkan wawancara dan observasi pada lokus penelitian di desa bojong gede kecamatan bojong gede kabupaten bogor provinsi jawa barat, dengan dibantu alat wawancara yang terdiri dari Handpone untuk digunakan Tape Recorder (Perekaman Suara), Alat Tulis, Lembar Pedoman Wawancara, Foto-foto dan Gambar-gambar yang akan membantu dalam proses penelitian berlangsung.

a. Tempat dan Waktu Penelitian.

Wawancara yang dilakukan sebelum observasi penelitian berlangsung, yaitu dimulai setelah sidang usulan penelitian yang diakui oleh penelitian sama dengan masa sebelum sidang komperhensif digelar.

Latar atau Lokasi Wawancara beberapa pada.

1. Perangkat desa dan tokoh masyarakat serta pelaku UMKM di desa bojong gede kecamatan bojong gede kabupaten bogor provinsi jawa barat
2. Masyarakat yang tinggal di desa bojong gede kecamatan bojong gede kabupaten bogor provinsi jawa barat.

b. Daftar Pertanyaan.

Daftar pertanyaan dibawa ini penulis gunakan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada desa dalam hal ini terkait dengan Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui (UMKM) di desa Bojong Gede Kecamatan Bojong gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dan lebih menguat dasar penelitian mengenai Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Ekonomi Melalui UMKM yang dibina oleh Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Bojong Gede).

Pertanyaan-pertanyaan ini juga akan peneliti gunakan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui UMKM desa. Hasil tersebut akan diuji keabsahan melalui triangulasi dan,

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan akan berkembang sesuai dengan data yang dibutuhkan.

1. Pertanyaan Kepada Informan Perangkat Desa.

- 1) Sejauh mana pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Bojonggede secara umum?
- 2) Kendala-kendala yang ditemui dan dihadapi Pemerintah desa dalam pembangunan secara umum?
- 3) Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui UMKM?
- 4) Apa kendala tokoh masyarakat dalam menampung aspirasi masyarakat?
- 5) Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam mewujudkan aspirasi masyarakat?
- 6) Bagaimana peran masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi melalui UMKM di desa?
- 7) Apa tugas tokoh masyarakat dalam semua proses pembangunan di desa?

2. Pertanyaan Kepada Informan Tokoh Masyarakat.

- 1) Sejauh mana pembangunan yang telah dilakukan pemerintah desa secara umum?
- 2) Apa saja kendala-kendala yang ditemui dan dihadapi Pemerintah Desa dalam Pembangunan secara umum?

- 3) Menurut Bapak/Ibu, apa Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) perangkat desa dalam mewujudkan pembangunan ekonomi di desa?
- 4) Bagaimana peran pemerintah desa dalam mengoptimalkan tujuan pembangunan ekonomi di desa?
- 5) Bagaimana peran pemerintah desa dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi di desa?
- 6) Bagaimana pengawasan pembangunan ekonomi di desa?
- 7) Apa harapan tokoh masyarakat pada pemerintah desa?

3. Pertanyaan Kepada Informan Masyarakat Sebagai Pelaku UMKM.

- 1) Apakah Pemerintah Desa melibatkan masyarakat dalam pembangunan ekonomi di desa?
- 2) Bagaimana peran pemerintah desa dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di desa?
- 3) Apa saja kendala-kendala yang ditemui dan dihadapi pemerintah desa dalam pembangunan ekonomi UMKM di desa?
- 4) Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa dalam pembangunan ekonomi di desa?
- 5) Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam menindalanjuti aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa?
- 6) Apakah pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan RPJMDES?

- 7) Apa harapan Bapak/Ibu kepada pemerintah desa dan tokoh masyarakat agar lebih maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui UMKM di desa?

TRANSKRIP WAWANCARA

Lampiran 3. Transkrip Wawancara

1. Pertanyaan Kepada Informan Tokoh masyarakat.

1) Sejauh mana pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Bojong Gede secara umum?

Jawaban :

“Pak Ihkwan dari kepala dusun 1 didesa bojonggede, belio menjelaskan didesa bojonggede terdiri dari 118 RT dan 24 RW dan terdiri dari 5 dusun dan belio adalah sala satu kepala dusun didesa bojonggede, selanjutnya belio menjelaskan tentang pembangunan secara umum didesa bojonggede, pemerintah desa bojonggede sejauh sekarang ini ditahun jauh sebelum sebelumnya memang sudah berjalan sesuai dengan tupoksinya tapi di 2014 awal sampai dengan saat ini 2023 sesuai dengan yang memang kita lihat bahwa bojonggede sudah semakin maju, dan saat ini kita sudah menjadi desa mandiri dan kalau untuk pembangunan toh sekala prioritas pastinya pembangunan baik disektor perkampungan dari mulai jalan, drenase dan lain-lain sudah berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah diatur bahwa baik dari bantuan dana desa terus juga baik dari BAPRD untuk pembangunan secara umum kita berjalan dengan lancar dan memang sesuai dengan pengajuan dari warga melalui RT untuk di ajukan kepada pemerintah desa dan kita buatkan sesuai dengan APBdes yang merangkum setiap tahunnya pembangunan mana saja yang telah berjalan secara umum”.

1) Kendala-kendala yang ditemui dan dihadapi pemerintah desa dalam pembangunan secara umum?

jawaban :

“Untuk kendala yaitu membutuhkan peran serta atau swadaya masyarakat itu harus diajak selalu oleh pemerintah desa dan bukan dari inisiatif masyarkat itu sendiri dan ini yang menjadi kendala bagi pemerintah desa karena warga tidak mau terlibat secara inisiatif dalam hal membangun desa, tetapi ditahun-tahun saat ini kalau untuk kendala sudah pasti ada tapi sangat kecil kalau dipersentasekan, dan untuk swadaya masyarakat sudah semakin baik didesa bojonggede apa lagi terkait pembangunan ataupun kegiatan-kegiatan desa pada umumnya”.

- 2) Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui UMKM?

jawaban :

“Kalau bicara UMKM berarti kita berbicara ekonomi, dan untuk desa bojonggede ini sampai saat ini kurang lebih ada 200-250 UMKM yang sudah terdaftar didesa, artinya pemerintah desa bojonggede mempunyai namanya kelembagaan UMKM terkusus desa yang mana disitu hampir warga desa bojonggede yang menjadi pelaku UMKM itu sendiri dan kalau untuk peran serta tokoh masyarakat yang pastinya sangat mendukung karena dengan adanya UMKM pastinya kita bisa meminimalisir angka pengangguran apa lagi beberapa waktu lalu terjadi wabah COVID-19 dengan adanya UMKM didesa itu sangat mendukung sekali peran serta UMKM dan dengan adanya komunitas UMKM kita membantu mendorong agar bagaimana dagangan masyarakat ini bisa di kenal oleh masyarakat pada umumnya dan kita sebagai toko masyarakat tentunya RT-RW sangat mendukung, setiap ifen kegiatan pasti akan melibatkan UMKM artinya apa, ini juga bisa mengangkat perekonomian pelaku UMKM agar bisa berkembang baik secara personal maupun secara umum”.

- 3) Apa kendala tokoh masyarakat dalam menampung aspirasi masyarakat?

jawaban :

“Semua masyarakat baik dari kalangan atas maupun kalangan paling bawah itu berhak menyampaikan aspirasi kepada pemerintah desa tetapi kadang masyarakat juga dalam menyampaikan aspirasinya yang sudah tertampung ini suka bablasan artinya tidak merujuk kepada peraturan pemerintah, misalkan satu contoh, ini mengapa pembangunan jalan belum juga dibangun-bangun juga ya mengapa begitu lama tidak dibangun, padahal semua pembangunan yang telah di agendakan itu semua diatur didalam APBdes, dan pembangunan tersebut semata-merta bahwa dalam setahun ini bojonggede bebas dari jalan rusak, karena dengan adanya bebas dalam memberikan aspirasi memang ada kekurangannya juga karena masyarakat mengutarakan aspirasinya dimedia sosial dan itu tantangan luar biasa buat pemerintah desa karena tidak bisa ditampung oleh RT dan RW dari pada lama akhirnya masyarakat membuat aspirasi tersebut lewat media sosial, padahal kalau kita telaa duduk bersama kan bisa menjadi paham antara pemerintah desa dan masyarakat, tetapi pemerintah desa selalu cepat tanggap, respon agar bagaimana aspirasi masyarakat bisa tertangulangi dengan baik dan benar”.

4) Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam mewujudkan aspirasi masyarakat?

jawaban :

“Dengan adanya aspirasi masyarakat, wujud nyata dari pemerintah desa adalah yang pertama yaitu mem foll up kembali dan memusyawarahkan kembali bagaimana caranya biar titik atau beberapa aspirasi yang tadi disampaikan itu biasa terealisasi dan itu memang perang RT-RW yang cukup berat, cara mewujutkannya adalah melakukan musyawarah dusun, musyawarah tingkat RT-RW agar bisa memilah aspirasi mana yang harus didahulukan dengan skala prioritas tetapi semua itu dilakukan secara bertahap”.

5) Bagaimana peran masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi melalui UMKM di desa?

jawaban :

“Pertama masyarakat harus mengikuti komunitas kelembagaan UMKM desa dengan mengisi formulir dan data diri lainnya selanjutnya desa akan mendaftarkan masyarakat tersebut melalui OSS agar bisa terdaftar ditingkat Usaha Mikro Kecil dan setelah itu akan keluar nomor NIB (Nomor Induk Berusaha) agar setiap ada bantuan dari pemerintah ini bisa diberikan kepada pedagang tersebut untuk dipergunakan meningkatkan usahanya.

Yang kedua potensi UMKM yang ada di wilayah desa dusun 1 kamumasin yaitu DODOL ini sudah sejak dahulu kala sampai saat ini masih ada, artinya itu adalah salah satu makanan khas dan juga oleh-oleh bojonggede, nah caranya bagaimana agar penjual dodol ini bisa dikenal masyarakat luas atau viral, caranya adalah desa mengedukasi pedagang-pedagang tersebut dan memberikan izin dan juga memberikan sertifikat halal, kedua memberikan pelatihan bagaimana cara mengolah dagangannya ini agar lebih menarik, dan ketiga bagaimana agar dagangan ini bisa dilihat keabsahannya atau terdaftar dipemerintah desa dan lain-lain, tetapi yang pasti adalah semua itu kembali kepada tokoh masyarakat yang mengajukan atau memberikan peluang kepada masyarakat yang menjadi jembatan untuk bisa bekerjasama dengan pemerintah desa dalam membangun UMKM”.

6) Apa tugas tokoh masyarakat dalam semua proses pembangunan di desa?

jawaban :

“Yang pertama dilakukan oleh tokoh masyarakat adalah harus menampung aspirasi warganya, kedua dia harus bisa memilih skala pembangunan mana yang harus diutamakan atau diprioritaskan, ketiga dia harus bisa menjaga lingkungan wilayahnya baik dari pembangunan jalan, drenase bersama warganya, tetapi berkaitan dengan pembangunan yang ada tentunya ini menjadi kewajiban seluruh pihak dan bukan hanya tokoh masyarakat saja tetapi juga pemerintah desa dan seluruh masyarakat bojonggede juga harus terlibat dalam menjaga lingkungan didesa bojonggede agar terawat”.

2) Pertanyaan Kepada Informan Perangkat Desa.

1) Sejauh mana pembangunan yang telah dilakukan pemerintah desa secara umum?

Jawaban :

“Pak H, Caal, Selaku Sekretaris Desa bojonggede mewakili Kepala desa Dede Malvina beliau mengatakan bahwa, sejauh sekarang ini kalau kita lihat pembangunan secara umum dibawa kepemimpinan kepala desa Dede Malvina, baik secara pembangunan fisik maupun non fisik, kita sudah menjalankan beberapa program ya itu program infrastruktur ataupun peningkatan ekonomi serta melakukan pembinaan kepada masyarakat, contohnya seperti program pembinaan Bersih Dari Narkoba (BERSINAR) disamping peningkatan ekonomi berkat kegigihan kepala desa terkait dengan pembangunan-pembangunan bersama masyarakat bersatu padu membangun desa bojonggede dan menjadikan desa bojonggede maju, mandiri dan berahaklak mulia sesuai dengan visi-misi desa”.

2) Apa saja kendala-kendala yang ditemui dan dihadapi pemerintah desa dalam pembangunan secara umum?

Jawaban :

“Secara garis besar hampir nyaris kita tidak menemukan kendala-kendala tetapi dalam proses pembagian wilayah tentu kita harus argumentasikan mana yang harus menjadi program skala prioritas agar kita bisa sesuaikan dengan anggaran yang ada didesa, kecuali anggaran yang tidak dicover oleh kita seperti pembangunan turap sungai karena itu memang kewenangannya PSDA”.

3) Menurut Bapak/Ibu, apa Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) perangkat desa dalam mewujudkan pembangunan ekonomi di desa?

Jawaban :

“Perangkat desa bertugas yaitu menjalankan segala urusan yang berkaitan dengan pelayanan publik kepada masyarakat, mendorong ekonomi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh desa serta menjalankan peraturan desa yang telah dibuat”.

- 4) Bagaimana peran pemerintah desa dalam mengoptimalkan tujuan pembangunan ekonomi di desa?

Jawaban :

“Dalam rangka mengoptimalkan pembangunan ekonomi masyarakat di desa ada beberapa usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa Bojonggede dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui UMKM, salah satu contohnya yaitu pembuatan usaha Dodol yang mana dodol ini merupakan ciri khas Bojonggede karena desa Bojonggede itu walaupun Pemerintahannya Kabupaten Bogor Provinsinya Jawa Barat tetapi secara budaya lebih kepada DKI Jakarta Betawi jadi dodol itu sebetulnya khasnya orang Betawi memang banyak sekali pengiat-pengiat yang ada di desa Bojonggede usaha-usaha rumahan yang ada di desa Bojonggede yang memproduksi dodol dan akhirnya melalui UMKM juga kita fasilitasi dan melakukan terobosan-terobosan yang dulu hanya ada dodol original sekarang itu sudah ada Bidol dan segala macam, disamping itu juga peran serta tokoh masyarakat dalam peningkatan ekonomi juga cukup berperan baik dan didukung infrastruktur yang memadai karena walau bagaimanapun ketika memang usaha-usaha itu ada di wilayah masing-masing, tetapi kalau tidak didukung dengan sarana prasarana yang kurang memadai rasanya memang agak sulit tetapi di Bojonggede Alhamdulillah itu yang terjadi peran serta tokoh masyarakat para tokoh masyarakat ikut ambil dalam program meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa”.

- 5) Bagaimana peran pemerintah desa dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan Ekonomi di desa?

Jawaban :

“Tentunya dalam proses perencanaan itu desa selalu melakukan koordinasi kepada setiap RT RW dan juga kepala dusun dalam menentukan program yang akan dilakukan oleh desa agar bisa terakomodir oleh anggaran desa yang ada, kemudian bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa tentunya dalam hal pengawasan baik anggaran maupun pembangunan yang telah berjalan, ini merupakan tugas semua pihak baik dari unsur RT RW dan kepala dusun terlebihnya masyarakat yang harus lebih jeli dalam melakukan pengawasan

kepada pemerintah desa, tetapi kalau kami didesa sudah ada perwakilan dari masyarakat yaitu BPD badan perwakilan desa.

Dalam menampung aspirasi masyarakat yang ada didesa Bojonggede memang semua aspirasi itu masuk kepada tokoh masyarakat dalam hal ini BPD jadi ketika memang para tokoh masyarakat dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat ada yang juga melalui kita ada juga yang melalui BPD cuma biasanya untuk masyarakat langsung bisa kita turun pada saat hari itu dan kita realisasi aspirasinya melalui pembangunan infrastruktur, ekonomi tetapi yang pertama kita lihat apakah itu masuk dalam kategori prioritas atau tidak itu yang pertama, yang kedua kalau memang masih masuk kedalam perencanaan kegiatan pembangunan desa yang bangunan sekolah mungkin biasanya kebetulan suatu kendala karena segala kegiatan itu pasti memiliki kendalanya masing-masing dalam hal penyusunan anggaran maupun programnya”.

3. Pertanyaan Kepada Informan Masyarakat Desa Bojong Gede Dan Pelaku UMKM.

- 1) Apakah pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pembangunan ekonomi di desa?

Jawaban :

“Menurut Ibu Anti Herwanti, Sebagai Wakil Ketua UMKM Desa Bojonggede, Kalau untuk didesa bojonggede sendiri ya setiap kegiatan pembangunan ekonomi maupun kegiatan pada umumnya, masyarakat selalu dilibatkan misalkan desa mau ada sebuah Project atau sebuah kegiatan, itu khususnya kami dibagian UMKM itu pasti dilibatkan untuk undangan rapat ataupun nanti undangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut bahkan bukan hanya sekedar ke arah ekonomi dengan pembangunan pun sama di situ kami melalui masyarakat itu sangat berdampak juga pada UMKM dan UMKM selalu di libatkan dalam semua kegiatan”.

- 2) Bagaimana peran pemerintah desa dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di desa?

Jawaban :

“Untuk kesejahteraan ekonomi desa juga ikut melibatkan masyarakat dan seperti halnya tadi dibagian dari UMKM dari desa kami diberi bantuan berupa gedung UMKM yang letaknya di area desa sendiri menghadap ke pasar kemudian kami

juga diberikan fasilitas seperti tenda untuk bazar dan juga gerobak untuk bazar, jadi itu sangat bermanfaat dan sangat terasa efeknya buat kami sebagai pelaku UMKM dan setiap kegiatan misalkan ada kegiatan besar kami selalu dipanggil untuk mengadakan bazar atau mengisi bagian-bagian dimana ada kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa”.

3) Apa saja kendala-kendala yang ditemui dan dihadapi pemerintah desa dalam pembangunan ekonomi UMKM di desa?

Jawaban :

“Kalau kendala itu sebenarnya dari masyarakatnya karena tidak semua pengiat UMKM itu mau diperjuangkan, karena kalau dari desa itu sudah memberikan bantuan dan mendorong UMKM untuk maju seperti memberikan surat-surat yang di butuhkan seperti SKHU itu diberikan oleh desa secara gratis dan tidak ada bayaran dari pihak masyarakat, kalau didesa lain mungkin dikenakan tarif untuk pengurusan SKHU, tetapi dari kami desa bojonggede itu sudah memberikan semuanya gratis, tetapi yang menjadi hambatan adalah kurangnya kesadaran atau respon dari masyarakat untuk memanfaatkan hal itu, sebab dari masyarakat sendiri mereka bukan pengusaha yang tangguh atau kurang maksimal dalam mengembangkan usaha UMKM nya, oleh sebab itu dari sekian banyak UMKM yang terdaftar didesa kurang lebih ada sekitar 300 UMKM tetapi sedikit yang masih aktif dalam usahanya”.

4) Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa dalam pembangunan ekonomi di desa?

Jawaban :

“Setahu kami masyarakat selalu dilibatkan dalam semua hal baik itu pembangunan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur, jadi desa selalu melibatkan masyarakat dalam setiap kebijakan atau ada pembangunan yang dilakukan didesa masyarakat itu selalu dilibatkan, misalkan dari setiap RT-RW juga ada tuh kalau misalkan ada sebuah projec nanti ada beberapa pengurus itu dimasukkan kedalam grup tersebut dan disitu ada komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, dan setelah itu nanti biasanya akan ada rapat didesa untuk pertemuan internal yang dimana rapat tersebut akan diwakilkan oleh masyarakat dan juga dari kelembagaan UMKM itu jadi memang selama ini untuk desa bojonggede masyarakat itu selalu dilibatkan”.

5) Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam menindalanjuti aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa?

Jawaban :

“Peran tokoh masyarakat sangat optimal, dan memang selalu diundang dalam setiap kegiatan, baik itu kegiatan pembangunan infrastruktur maupun kegiatan ekonomi ataupun juga kegiatan acara-acara desa itu selalu mengundang tokoh-tokoh masyarakat demi untuk kemajuan desa bojonggede”.

6) Apakah pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan RPJMDES?

Jawaban :

“Tentu masyarakat selalu diundang dalam proses penyusunan RPJMdes karena dari aspirasi masyarakat itulah bisa terwujud sebuah program yang akan disepakati bersama dalam proses MUSDES musyawarah desa walaupun tidak semuanya tetapi perwakilan tetapi mewakili keseluruhan masyarakat desa, yang pasti itu pemerintah desa selalu meminta ide atau masukan dari masyarakat, untuk nanti disusun menjadi program agar sesuai dengan keinginan masyarakat desa”.

7) Apa harapan Bapak/Ibu kepada pemerintah desa dan tokoh masyarakat agar lebih maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui UMKM di desa?

Jawaban :

“Harapan kami dari pelaku UMKM itu sudah lebih dari cukup karena desa sudah memberikan bantuan berupa fasilitas gedung, tenda dan gerobak untuk dipergunakan dalam kegiatan bazar jadi desa sudah sangat betul-betul mensupport UMKM cuman dari masyarakatnya kurang memaksimalkan fasilitas yang sudah disediakan desa, dari sekian banyak UMKM didesa ada sekitar 300 UMKM tetapi yang aktif hanya 100 UMKM sedangkan yang lainnya hanya aktif jika ada even atau acara-acara didesa”.

FOTO DOKUMENTASI

Gambar 3.4 Foto Pada Saat Mengurus Surat Izin Penelitian di Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor 2023



FOTO DOKUMENTASI

Foto Bersama Sekretaris Desa Bapak H, Caal



Gambar 3.5 Wawancara Informan pertama sebagai Sekretaris Desa Mewakili Kepala Desa Bojong Gede

FOTO DOKUMENTASI

Gambar 3.6 Foto Bersama Ibu Sriwahyuni Selaku Ketua PKK Desa Bojong Gede



FOTO DOKUMENTASI

Foto Bersama Bapak Ihkwan Selaku Kepala Dusun 1



Gambar 3.7 Wawancara Kepala Dusun Bojong Gede sebagai Informan Kedua 2023

FOTO DOKUMENTASI

Foto Bersama Ibu Anti Herwanti Selaku Wakil Ketua UMKM Desa Bojong Gede



Gambar 3.8 Wawancara Wakil Ketua UMKM Desa Bojong Gede Sebagai Informan Ke Tiga

FOTO DOKUMENTASI

Foto Bersama Staf Bidang Administrasi dan Masyarakat Desa Bojong Gede



Gambar 3.9 Wawancara Masyarakat dan Perangkat Desa Bojong Gede

- 1. Ibu Rusmiyatun**
- 2. Pak Muhammad jihat ilham**
- 3. Dede Sahlani**
- 4. Pak Mulyadi**

DOKUMEN IZIN PENELITIAN
Lampiran 4. Surta Izin Penelitian Dari Kampus STIP-AN



**SEKOLAH TINGGI ILMU PEMERINTAHAN
ABDI NEGARA**

Prodi Ilmu Pemerintahan : SK BAN-PT No. 2537/SK/BAN-PT/Akred/SIIX/2016, Terakreditasi Peringkat "B"
 Prodi Ilmu Politik : SK BAN-PT No. 2534/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/SI/IV/2022, Terakreditasi Peringkat "B"

Kampus :
 Jl. Lenteng Agung No. 37 A, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12610 Telp/Fax : (021) 786 7696, 788 906 72, 788 906 73
 Website : www.stipan.ac.id E-mail : admin@stipan.ac.id

Jakarta, 13 Februari 2023

No : 124 /STIPAN-A1/II/2023
 Lamp : -
 Perihal : Surat Ijin Penelitian

Kepada Yth.
 Badan Kesbangpol Kabupaten Bogor

Sehubungan dengan adanya penulisan Skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, bersama ini kami mohon agar mahasiswa tersebut di bawah ini, diberikan ijin untuk mengadakan penelitian.

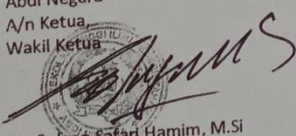
Nama : Rikardus Monaweyauw
 NPM : 172041832
 Judul Skripsi : Peran Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
 Pembimbing : Jovan Prima Firmasyah, S.Sos, M.Hum

Kami mohon sudilah kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan bantuan kepada mahasiswa tersebut berupa penjelasan dan bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan Skripsi dimaksud.

Bahan-bahan ini hanya akan diolah dalam batas keperluan intern Kampus.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan
 Abdi Negara
 A/n Ketua,
 Wakil Ketua


 Dr. Sofyan Safari Hamim, M.Si

Tembusan :
 1. Kepala Desa Bojong Gede

DOKUMEN IZIN PENELITIAN

Lampiran 5. Rekomendasi Penelitian Dari Kesbangpol Kabupaten Bogor

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. KSR Dadi Kusmayadi Komplek Pemda Kel. Tengah Cibinong – Bogor 16914 Telp/Fax. (021) 8758836
 Email : kesbangpolbogor09@gmail.com, Tlp/Fax. (021) 8758836

Nomor : 000.9.2/ICG - Bakesbangpol
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Cibinong, 17 Februari 2023
 Kepada
 Yth. Kepala Dinas Koperasi Usaha
 Kecil dan Menengah
 Bogor Kabupaten
 di
 Cibinong

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.

Memperhatikan :

Surat Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, Nomor : 121/STIPAN-A1/II/2023, Tanggal 13 Februari 2023. Perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Atas dasar tersebut diatas, kami memberikan **Rekomendasi Penelitian** kepada :

Nama : **RIKARDUS MONAWEYAU**
 Alamat : Timika Indah Rt. 011 Rw. 000 Desa Timika Indah Kecamatan Mimika Baru
 Judul Penelitian : Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
 Penanggung Jawab : **Dr. Sofyan Safari Hamim, M.Si**
 Jumlah Peserta : 1 (Satu) Orang
 Waktu : 17 Februari 2023 s.d 17 Mei 2023
 Tempat : Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati seluruh Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
2. Ikut menjaga situasi, stabilitas kerukunan, ketentraman dan ketertiban di lokasi Penelitian;
3. Senantiasa berkoordinasi dan mengikuti petunjuk dan arahan dari tempat lokasi penelitian setempat;
4. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan di luar ketentuan yang ditetapkan di atas;
5. Mengadakan koordinasi dengan stakeholder terkait;
6. Mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19;
7. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, agar Mahasiswa yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Bupati Bogor melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN




DANUWANG WILNODO TAWEKAL, M.Si
 NIP. 196802141989031008

Tembusan :

1. Yth. Plt. Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
2. Yth. Camat Bojonggede;
3. Yth. Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara.

DOKUMEN IZIN PENELITIAN**Lampiran 6. Tanda Terima Surat Dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Bogor**

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
<u>TANDA TERIMA SURAT</u>	
Nomor Surat	: 000.0.2 / 100 - Bakesbangpol
Perihal	: Rekomendasi penelitian
Tanggal Surat	: 17 Feb 2023
Asal Surat	: Bakesbangpol Kab. Bogor
	Cibinong, 21 Feb 2023
	Pengirim,
 Penerima, (.....) 007777 876.00	(.....)

DOKUMEN IZIN PENELITIAN

Lampiran 7. Rekomendasi Penelitian Dari Kecamatan Bojong Gede



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN BOJONGGEDE
 Jalan Raya Bojonggede Nomor 316 Tlp (021) 8781078,
 Website <http://www.bogorkab.go.id>, E-mail kecbojonggede.kabbogor@gmail.com

Bojonggede, Februari 2023

Nomor : 800.3.82/ 119 – Umpeg Sifat : Per.ting Lampiran : - Perihal : <u>Rekomendasi Penelitian</u>	Kepada Yth. Kepala Desa Bojonggede Di- Tempat.
--	--

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Bogor nomor : 000.9.2/109 – Bakesbangpol tanggal 17 Februari 2023 perihal Rekomendasi Penelitian, dengan ini diminta agar saudara membantu dan memfasilitasi nama tersebut di bawah ini :

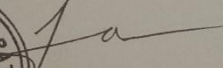
Nama	: RIKARDUS MONAWEYAU
Alamat	: Timika indah Rt. 011 Rw. 000 Desa Timika indah Kecamatan Mimika Baru
Judul Penelitian	: Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
Penanggung Jawab	: Dr. Sofyan Safari Hamim, M.Si
Waktu	: 17 Februari 2023 s.d 17 Mei 2023
Tempat	: Desa Bojonggede

Untuk memperoleh data dalam rangka persyaratan / kelengkapan penyusunan Skripsi yang bersangkutan, Dengan ketentuan :

1. Sepanjang kegiatan tersebut diatas tidak mengganggu keamanan dan ketertiban social politik;
2. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan diluar ketentuan yang ditetapkan;
3. Setelah selesai agar melaporkan hasilnya kepada Camat Bojonggede melalui Kasubag Umum dan Kepegawaian.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

CAMAT,



EDY SUTONO P, AP., M.Si
 Camat Tingkat I, IV/b
 NIP. 197305041994021003

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
2. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Kepala Bakesbangpol Kabupaten Bogor;
4. Sdr. RIKARDUS MONAWEYAU.

RIWAYAT HIDUP



Rikardus Monaweyauw, lahir di Kota Timika, Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah pada tanggal 24 juni 1997, merupakan putra ke-5 dari 5 bersaudara, terdiri dari 3 putri dan 2 putra pasangan dari Bapak Philipus Monaweyauw, SE,MM dan Ibu Magdalena Timakopea.

Penulis memulai pendidikan di SD-INPRES TIMIKA V pada tahun 2002-2008 dikampung Limau

Asri, Lalu penulis melanjutkan pendidikan ditingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 kampung Limau Asri pada tahun 2009-2010 setelah itu penulis memutuskan untuk mengikut program paket C setara SMA/MA yang di selenggarakan oleh dinas pendidikan kabupaten mimika pada tahun 2010 dan di nyatakan LULUS kemudian pada tahun 2015 penulis bekerja disalah satu yayasan di timika dengan profesi sebaga PL atau petugas lapangan dan juga sebagai driver mobil, hingga pada tahun 2017 penulis mengikuti tes penerimaan Beasiswa yang dibuka oleh Pemerintah Kabupaten Mimika untuk menjadi mahasiswa (STIP-AN) Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara di Jakarta pada tahun 2017 dengan Jurusan Ilmu Pemerintahan, selama mengikuti pendidikan di STIP-AN, penulis aktif mengikuti kegiatan DIKSARMENDIS dan DIKLATSU selama 1 bulan Disubang Jawa Barat, dan dilanjutkan pendidikan selama 2 tahun 6 bulan, kemudian penulis juga aktif dalam kegiatan organisasi wahana bina praja STIP-AN dengan memulai semuanya dari bawa dan sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dari MENWA diantaranya mengikuti Diksarmendis Menwa, Polpra dan lain sebagainya hingga pada tahun 2021 penulis seharusnya sudah lulus dari STIP-AN tetapi karena ada beberapa kendala yang dialami sehingga penulis menunda hingga tahun 2023 penulis bisa menyelesaikan Kuliah di Kampus STIP-AN Jakarta.